



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2025 - 2029

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2025–2029 ini dapat disusun dengan baik. Renstra ini disusun sebagai bentuk komitmen dan arah kebijakan strategis yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas selama lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2025–2029 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja utama yang akan dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendukung pembangunan sosial yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah daerah, mitra kerja, akademisi, maupun masyarakat. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, saran, serta data dan informasi yang sangat berguna dalam penyusunan Renstra ini.

Kami berharap dokumen ini tidak hanya menjadi acuan internal, tetapi juga menjadi sarana transparansi dan akuntabilitas publik terhadap upaya peningkatan pelayanan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di Kota Probolinggo. Dengan adanya sinergi antar pihak, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Akhir kata, semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi pijakan yang kuat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan perlindungan hak-hak kelompok rentan di Kota Probolinggo. Kami terbuka terhadap segala kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan pelaksanaan tugas di masa yang akan datang.

Probolinggo, September 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO**



Dr. REY SUWIGTYO, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670711 198809 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra	4
1.3 Maksud Dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.1.1 Tugas dan Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	11
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.1.3.1 Evaluasi Capaian Kinerja Pelayanan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020 - 2024	25
2.1.3.2 Kinerja Pelayanan Indikator Makro Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	36
2.1.3.3 Penerapan Standart Pelayanan Minimal (SPM)	37
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	40
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	42
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	44
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	44
2.2.2 Isu Strategis	50
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
3.1 Tujuan Renstra PD Kota Probolinggo tahun 2025 – 2029	62
3.2 Sasaran Renstra PD Kota Probolinggo tahun 2025 – 2029	63
3.3 Strategi PD dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025 – 2029	68
3.4 Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025 – 2029	74
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	76
4.1 Uraian Program	127
4.2 Uraian Kegiatan	131
4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif	137
4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	237

4.5	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (Iku) Perangkat Daerah	242
4.6	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci	243
BAB IV	PENUTUP	246

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Status Kepegawaian	18
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Jabatan	18
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang	20
Tabel 2.4	Komposisi Pegawai di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Tingkat Pendidikan	21
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	22
Tabel 2.6	Sarana dan Prasarana Responsif Gender Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	22
Tabel 2.7	Anggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat	23
Tabel 2.8	Anggaran Pembangunan PPPA	23
Tabel 2.9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial PPPA	27
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial PPPA	34
Tabel 2.11	Kinerja Pelayanan Indikator Makro Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	36
Tabel 2.12	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Probolinggo Tahun 2024	38
Tabel 2.13	Alokasi Anggaran yang mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Sosial pada Dinas Sosial PPPA Tahun anggaran 2024	40
Tabel 2.14	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	48
Tabel 2.15	Teknik menyimpulkan Isu Strategis PD	52
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD	65
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	69
Tabel 3.3	Penahapan Renstra PD	70
Tabel 3.4	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	74
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD	81
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan	138
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	237
Tabel 4.4	Tabel Indikator Kinerja Utama PD	243
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci	244

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen perencanaan yang disebut Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan sebuah perancangan untuk periode 5 tahun yang mencakup berbagai elemen seperti tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Dokumen Renstra disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi perangkat daerah, mengikuti pedoman dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo (Renstra Dinas Sosial PPPA) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas selama lima tahun ke depan. Renstra ini mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kota Probolinggo serta kebijakan pembangunan nasional dan daerah yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam menangani permasalahan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok rentan melalui kebijakan yang partisipatif, inklusif dan responsif gender. Berbagai tantangan sosial, seperti kemiskinan, ketimpangan gender, serta perlindungan terhadap anak dan perempuan, menuntut adanya kebijakan yang terarah dan berkelanjutan serta selaras dengan perencanaan pembangunan Nasional dengan memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas guna menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan inklusif.

Upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta memenuhi harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan yang lebih baik merupakan fokus utama. Koordinasi dan integrasi menjadi penting dengan peningkatan koordinasi antarbagian di dalam organisasi dan integrasi berbagai aspek tugas serta fungsi perangkat daerah.

Rencana strategis ini juga menjadi panduan dalam menghadapi ketidakpastian dan risiko yang mungkin muncul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah juga menjadi fokus, sementara dasar untuk pengukuran kinerja dan evaluasi pencapaian tujuan diberikan untuk memonitor dan mengevaluasi progres secara berkala. Melalui pemahaman terhadap latar belakang ini, perencanaan strategis perangkat daerah diharapkan dapat membantu organisasi mengatasi tantangan, memanfaatkan peluang, dan mencapai keunggulan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Perencanaan strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo (Dinas Sosial PPPA) ini disusun sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang kemudian ditegaskan lagi melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Perencanaan Pembangunan yang dimaksud disusun berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Probolinggo Nomor 000.7.2.2/529/425.002/2025 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan

Pembangunan, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Probolinggo Tahun 2025-2029, Dinas Sosial PPPA memperhatikan:

- 1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kota Probolinggo sampai dengan tahun 2029;
- 2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo Tahun 2019-2029;
- 3) Isu-isu strategis yang berkembang;
- 4) Kebijakan nasional; dan
- 5) Regulasi yang berlaku.

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo (Renstra Dinas Sosial PPPA) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan pemahaman lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat, dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Rencana Strategis ini juga merupakan panduan bagi aparatur Dinas Sosial PPPA dalam melaksanakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial, memberdayakan perempuan serta memberikan upaya perlindungan bagi perempuan dan anak didalam masyarakat.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, sebagai institusi strategis juga mempunyai peran dan fungsi melaksanakan kebijakan pembangunan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan membangkitkan potensi intelektual dan kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan pada tiap-tiap proses pembangunan yang selalu memperhitungkan aspek-aspek sosial, budaya,

ekonomi dan fisik lingkungan sebagai jaminan terciptanya Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan peningkatan peran serta perempuan dan masyarakat guna meningkatkan derajat kesejahteraan di Kota Probolinggo.

Oleh karena itu, untuk terarahnya pelayanan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial agar dapat berlangsung efektif, efisien, jelas, terukur dan tepat sasaran harus disusun sebuah perencanaan yang matang dan strategis yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan masalah ke dalam sebuah rancangan strategis sebagai pedoman normatif dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RENSTRA

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinsos PPPA Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- b. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO

- 138 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak;
 - g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
 - h. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman dan Penetapan SPM (Standar Pelayanan Minimal);
 - i. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - j. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 - k. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- o. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- q. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136);
- r. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
- s. Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- u. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- aa. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- bb. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 6);
- cc. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 46);
- dd. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 95);
- ee. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 96);
- ff. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- gg. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 9);
- hh. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 9);
- ii. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025–2029
 - jj. Peraturan Walikota Probolinggo nomor 10 tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender;
 - kk. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 36 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
 - ll. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo
 - mm. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 47 Tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo periode 2025 - 2029 adalah:

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu dua tahun (2025 - 2029) dapat tercapai;
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
- c. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah:

- a. Menetapkan dokumen yang memuat jabaran arahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 kedalam rencana instansional sekaligus menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. Menyediakan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan dalam upaya mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan reponsif gender.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Probolinggo secara teknis disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, landasan normatif penyusunan maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Tugas dan Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah
(termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra PD Kota Probolinggo tahun 2025 – 2029

3.2 Sasaran Renstra PD Kota Probolinggo tahun 2025 – 2029

3.3 Strategi PD dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025 – 2029

3.4 Arah Kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025 – 2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

4.2 Uraian Kegiatan

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat di antaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat;
- 2) Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat;
- 3) Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat.
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:

- 1) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a) Subbagian Tata Usaha; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

- 3) Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
- 4) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat, terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
- 5) Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
- 6) Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak, terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan pelaksana; dan
- 7) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Adapun uraian Tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

- 1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, serta penyusunan program dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a) Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas;
 - b) Pelaksanaan administrasi keuangan Dinas;
 - c) Pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada Dinas;
 - d) Pelaksanaan administrasi kepegawaian Dinas;
 - e) Pelaksanaan administrasi umum Dinas;
 - f) Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
 - g) Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
 - h) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
 - i) Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 2) Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
 - a) Melaksanakan administrasi kepegawaian Dinas;
 - b) Melaksanakan administrasi umum Dinas;
 - c) Melaksanakan administrasi barang milik daerah pada Dinas;
 - d) Melaksanakan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas;
 - e) Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas;
 - f) Melaksanakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas; dan
 - g) Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 3) Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial
Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan tugas di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana dan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai fungsi:
 - a) Pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial;
 - b) Pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
 - c) Pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar;
 - d) Pelaksanaan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah;
 - e) Pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
 - f) Pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;

- g) Pelaksanaan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke kelurahan asal.
- h) Pelaksanaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri, meliputi Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri; dan
- i) Pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan sosial, pengelolaan taman makam pahlawan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT);
- b. Pelaksanaan pengumpulan sumbangan dalam Daerah;
- c. Pelaksanaan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah;
- d. Pelaksanaan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan, melaksanakan tugas di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, dan pengelolaan sistem data gender dan anak. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan daerah;
- b) Pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
- c) Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- d) Pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah;
- e) Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah;
- f) Pelaksanaan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah;
- g) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah;
- h) Pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak, melaksanakan tugas di bidang perlindungan perempuan, Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan perlindungan khusus anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak, mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah;
- b) Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan;
- c) Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah;

- d) Pelaksanaan pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan;
- e) Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- f) Pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;
- g) Pelaksanaan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah;
- h) Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah;
- i) Pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

UPTD merupakan unit pelaksana teknis daerah yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus masalah lainnya.

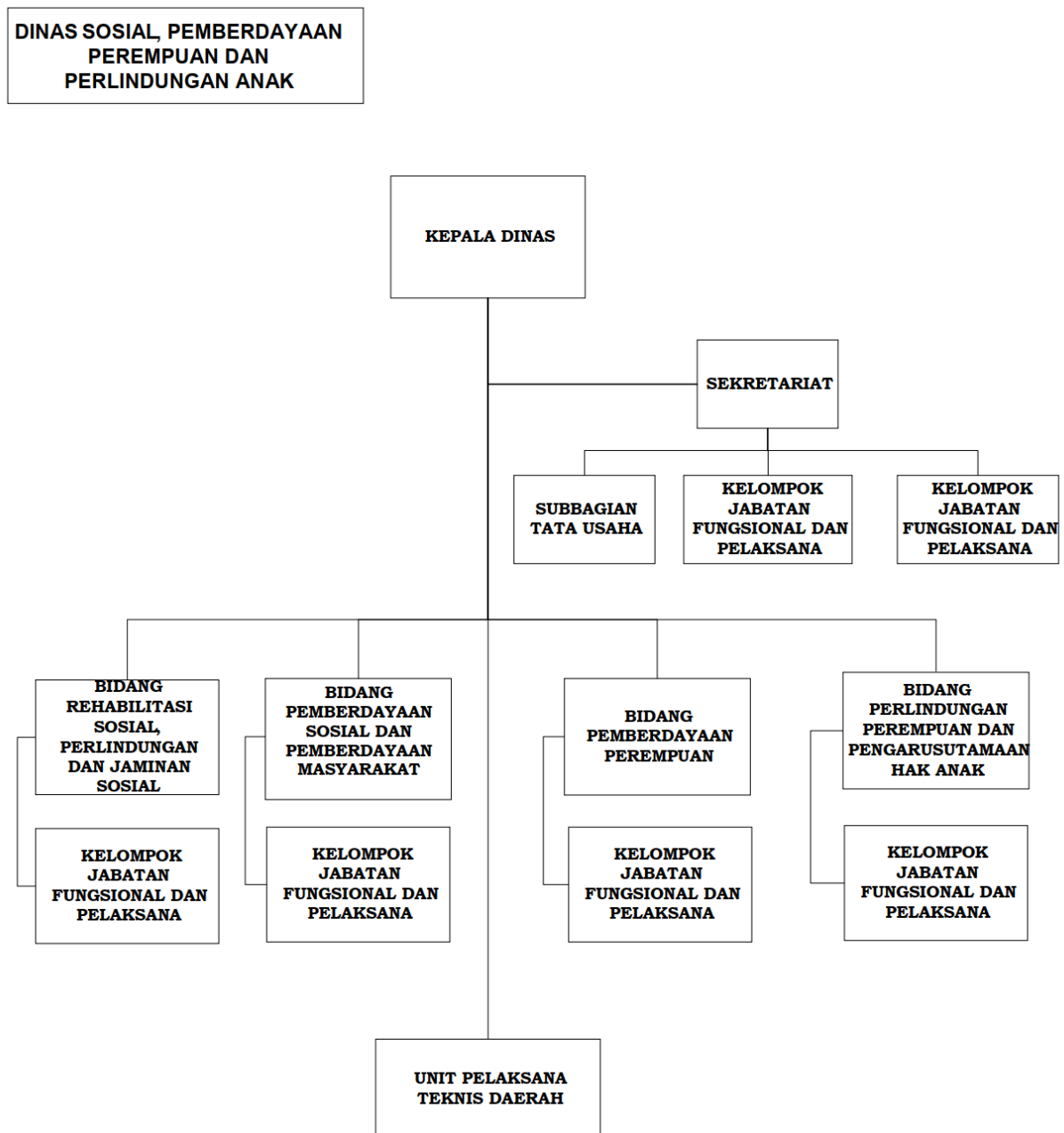
UPTD PPA dipimpin oleh seorang Kepala UPTD PPA yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD PPA mempunyai fungsi :

- a) Penyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka pelaksana kebijakan teknis dibidang perlindungan perempuan dan anak;
- b) Pelaksana program kerja dan kebijakan teknis dalam rangka menyelenggarakan fungsi layanan sebagai berikut :
 - 1. Pengaduan masyarakat;
 - 2. Penjangkauan korban;
 - 3. Pengelolaan kasus;
 - 4. Penampungan sementara;
 - 5. Mediasi;

6. Pendampingan korban.

Bagan Struktur Organisasi:

Bagan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1) Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo pada 1 Juli tahun 2025 seluruhnya sebanyak 50 orang. Dari seluruh pegawai yang ada tersaji ditunjukkan pada data berikut:

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Status Kepegawaian

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH TOTAL	PERSENTASE
1	PNS	10	19	29	58%
2	PPPK	1	2	3	6%
3	NON ASN	10	8	18	36%
JUMLAH		21	29	50	100%

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Jabatan

NO.	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	Sekretariat			
	- Kepala Dinas	1	-	1
	- Sekretaris	-	1	1
	- Tenaga Fungsional	-	3	3
	- Kepala Sub bagian Tata Usaha	-	1	1

	- Rumpun Jabatan Pelaksana	2	2	4
	- Non ASN	3	2	5
2	Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial			
	- Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	-	1
	- Tenaga Fungsional	-	4	4
	- Rumpun Jabatan Pelaksana	3	-	3
	- Non ASN	2	1	3
3	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat			
	- Kepala Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat	1	-	1
	- Jabatan Fungsional	-	3	3
	- Jabatan Pelaksana	2	-	2
	- Non ASN	2	2	4
4	Bidang Pemberdayaan Perempuan			
	- Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	-	1	1
	- Jabatan Fungsional	-	2	1
	- Jabatan Pelaksana		2	2
	- Non ASN	1	1	2
5	Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak			
	- Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak		1	1
	- Jabatan Fungsional	1	-	1
	- Jabatan Pelaksana	1	-	1
	- Non ASN	1	2	3
6	UPTD			

-	Kepala UPTD	-	-	-
-	Jabatan Fungsional	-	-	-
-	Jabatan Pelaksana	-	-	-
-	Non ASN		1	1
JUMLAH		21	29	50

Tabel 2.3

Komposisi Pegawai di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

NO.	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KETERANGAN
		L	P		
1	Pembina Utama (IV/c)	1	-	1	
2	Pembina Tk. I (IV/b)	-	1	1	
3	Pembina (IV/a)	1	3	4	
4	Penata Tk. I (III/d)	-	8	8	
5	Penata (III/c)	-	-	-	
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	-	1	1	
7	Penata Muda (III/a)	5	2	7	
8	Pengatur Muda Tk. I (II/d)	3	4	7	
9	PPPK	1	2	3	
10	Non ASN	10	8	18	
JUMLAH		21	29	50	

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai ASN di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KETERANGAN
		L	P		
1	S3	1	1	2	
2	S2	1	7	8	
3	S1	5	10	15	
4	D3	-	1	1	
5	SLTA	4	2	6	
JUMLAH		11	21	33	

2) Sarana dan Prasarana Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo didukung dengan Sarana dan Prasarana seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	SARANA PRASARANA	ALAMAT/LOKASI	JUMLAH
1	Gedung Kantor Dinas Sosial PPPA	Jl. Raya Dringu 13	1
2	Shelter	Jl. Mastrip	1
3	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Jl. Basuki Rahmad	1
4	Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Jl. Slamet Riyadi	1
5	Kantor Bersama TAGANA dan TKSK, PSM, LK3	Jl. Panglima Sudirman	1

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Responsif Gender Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	SARANA PRASARANA	KETERSEDIAAN		KET
		TERSEDIA	BELUM	
1	Ruang Laktasi	√		
2	Toilet responsif gender	√		
3	Toilet khusus kelompok rentan	√		
4	Akses Disabilitas (Guiding Block, Jalan Landai dengan pegangan rambat)	√		
5	Jalur evakuasi bencana	√		
6	Kursi roda/tongkat/krek	√		
7	Pojok Baca	√		
8	Arena Bermain untuk Anak	√		
9	Loket Khusus Kelompok Rentan	√		
10	Parkir Khusus Kelompok Rentan	√		

3) Sumberdaya Keuangan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo melaksanakan kegiatan dengan sumber dana sebagai berikut:

Tabel 2.7
Anggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat

No	TAHUN	JUMLAH			
		APBD	DBH-CHT	APBD PROV	APBN
1	2020	7,557,565,929	0	0	0
2	2021	6.156.743.445	0	0	0
3	2022	8.318.472.649	450.655.800	0	0
4	2023	6.834.404.875	6.809.719.049	0	0
5	2024	8.760.489.963	6.887.530.400	0	0

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pencegahan/ sosialisasi, rehabilitasi, penyelamatan, perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan lanjut bagi PMKS/PPKS dan PSKS.

Tabel 2.8
Anggaran Pembangunan PPPA

No	TAHUN	JUMLAH			
		APBD	DBH-CHT	APBD PROV	DAK NF
1	2020	320.293.985	0	0	0
2	2021	351.709.000	0	0	0
3	2022	1.315.714.900	0	0	451.800.000
4	2023	1.097.285.880	0	0	438.800.000
5	2024	1.109.452.000	0	0	406.000.000

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Sosial PPPA diukur berdasarkan efektivitas dalam memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan, mengurangi ketidaksetaraan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Kinerja pelayanan Dinas Sosial PPPA mencakup berbagai aspek dalam upaya menyediakan bantuan dan dukungan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan. Berikut adalah gambaran umum kinerja pelayanan Dinas Sosial PPPA:

- 1) **Identifikasi Kebutuhan:**
Menganalisis dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, terutama yang berada dalam situasi rentan atau membutuhkan dukungan sosial.
- 2) **Pendataan dan Pemetaan:**
Melakukan pendataan dan pemetaan untuk mengetahui jumlah dan distribusi populasi yang memerlukan layanan sosial.
- 3) **Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial:**
Merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi program-program bantuan sosial seperti bantuan tunai, bantuan pangan, atau program keamanan sosial.
- 4) **Penanganan Krisis dan Keadaan Darurat:**
Memberikan bantuan dan dukungan saat terjadi krisis atau keadaan darurat, seperti bencana alam atau situasi konflik sosial.
- 5) **Pemberdayaan Masyarakat:**
Mengembangkan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mandiri dan kemandirian individu atau kelompok.
- 6) **Penyuluhan dan Edukasi:**
Memberikan informasi, penyuluhan, dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hak-hak sosial, layanan yang tersedia, dan cara mengakses bantuan.
- 7) **Penanganan Anak dan Keluarga:**
Menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak atau keluarga yang memerlukan perlindungan dan dukungan khusus.

- 8) **Rehabilitasi Sosial:**
Menyediakan program rehabilitasi sosial untuk individu yang mengalami masalah kecanduan atau rehabilitasi sosial lainnya.
- 9) **Kolaborasi dengan Pihak Eksternal:**
Bekerja sama dengan organisasi nirlaba, lembaga pemerintah lainnya, dan sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas dan cakupan layanan.
- 10) **Monitoring dan Evaluasi:**
Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan tujuan dan memberikan dampak positif.
- 11) **Penyediaan Layanan Konseling:**
Menyediakan layanan konseling sosial untuk membantu individu atau kelompok mengatasi masalah emosional, psikologis, atau sosial.
- 12) **Advokasi dan Pemajuan Kebijakan Sosial:**
Terlibat dalam advokasi untuk memajukan kebijakan sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan memberikan suara kepada kelompok yang rentan.

2.1.3.1 Evaluasi Capaian Kinerja Pelayanan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020 - 2024

Kinerja Pelayanan SKPD ini memberikan gambaran atas apa yang telah dilakukan oleh SKPD selama ini dan harapannya menjadi awal *milestone* terkait penyelenggaraan urusan sesuai dengan kewenangan Dinas Sosial PPPA. Berdasarkan Kewenangannya, Dinas Sosial PPPA kota Probolinggo mengampu:

- a) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yakni urusan Sosial; dan
- b) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yakni:
 - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan UU 11 tahun 2009, dalam pembagian urusan pemerintah bidang

sosial:

a) pemberdayaan sosial mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Sosial KAT;
2. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota;
3. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten/kota;
4. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota.

b) Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Pemulangan Warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan.

c) Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum

d) Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Pemeliharaan Anak-anak terlantar.
2. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota.

e) Penanganan Bencana

1. Penyediaan Kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota.
2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota.

f) Taman Makam Pahlawan

Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan program kegiatan, yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota probolinggo dalam kurun waktu terakhir ini tersaji dalam gambaran sebagai berikut:

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial PPPA

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	SPM																		
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhannya	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	74,44%	100%	100%	100%	-	74,44%	100%	100%	100%

2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	77,42%	100%	100%	100%	-	77,42%	100%	100%	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	80,95%	98,67%	100%	100%	-	80,95%	98,67%	100%	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar panti	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	88,77%	98,67%	100%	100%	-	88,8%	98,7%	100,0%	100,0%

5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi Korban Bencana Kota	Jumlah warga negara korban bencana kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	98,29%	100%	100%	100%	-	98,3%	100,0%	100,0%	100,0%
URUSAN SOSIAL																		
1	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	-	-	-	-	-	-	-	85089	-	118597	112880	-	-	-	-	-	-
2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (orang)	-	-	-	-	-	-	-	71819	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	persentase jumlah para eks	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	penyang ang penyakit sosial yang berhasil dibina dan berhasil hidup mandiri																		
4	potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	-	-	-	-	-	-	-	-	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Jumlah Panti Asuhan, Rumah Jompo dan Rumah Singgah	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	URUSAN PPPA																		
1	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	170 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	50.80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Jumlah pekerjaan perempuan di lembaga swasta	-	-	-	-	-	-	-	-	9500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Indeks Pemberdayaan Gender	-	-	-	68,55	68,30	68,35	68,40	68,45	65,92	65,05	65,81	68,74	76,80	96%	95,2%	96,3%	100,5%	112,2%
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	-	-	-	-	-	-	-	95,87	96,36	96,66	97,06	97,26	-	-	-	-	-
6	Jumlah kasus kekerasan anak yang mendapat perlindungan dan pengawasan	-	-	-	-	-	-	-	-	30	20	22	29	29	-	-	-	-	-

7	Persentase pekerja anak yang mendapatkan perlindungan dan pengawasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang berhadapan dengan hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Jumlah laporan kekerasan anak	-	-	-	-	-	-	-	-	23	26	20	26	22	-	-	-	-	-
10	Jumlah laporan kekerasan perempuan	-	-	-	-	-	-	-	-	22	26	20	26	22	-	-	-	-	-
11	Jumlah KDRT	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-				
12	Kota Layak Anak	-	-	-	-	Utama	Utama	Utama	Utama	-	Nindya	Utama	Utama	-	-				

Berdasarkan Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo:

1. Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dalam kurun waktu lima tahun terakhir, meskipun awalnya sedang, namun meningkat secara signifikan hingga mencapai 100% pada tahun 2024 sesuai target dengan rasio pencapaian sebesar 100% untuk seluruh komponen SPM.
2. Indeks Pemberdayaan Gender mengalami tren positif dalam lima tahun terakhir yang ditandai dengan kenaikan persentase indeks setiap tahun dan memiliki rasio pencapaian sebesar 112,2% pada tahun 2012.
3. Laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami fluktuatif setiap tahun dalam waktu lima tahun terakhir, namun semuanya dapat tertangani 100%.
4. Pencapaian peringkat Kota Layak Anak beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil yang positif. Sejak tahun 2022 memperoleh kategori Utama. Pencapaian ini semakin mengukuhkan predikat Kota Probolinggo sebagai Kota Layak Anak.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan secara umum bahwa kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dan konsisten bernilai baik dengan sebagian besar indikator mencapai target yang telah ditetapkan

Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo tersaji pada tabel 2.7 di bawah ini:

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial PPPA

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	-	10.050.260.722	2.640.434.890	8.570.314.179	8.987.611.234	-	7.309.697.104	2.153.775.295	6.571.660.985	7.978.377.705	-	72,73%	81,57%	76,68%	88,77%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	360.211.000	1.315.714.900	1.097.285.880	1.109.858.000	-	347.678.430	807.716.304	1.029.670.660	1.037.060.328	-	96,52%	61,39%	93,84%	93,44%

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	51.645.000	3.200.000	1.400.000	768.600.000	-	28.555.000	3.172.000	1.367.550	754.833.700	-	55,29%	99,13%	97,68%	98,21%
NON URUSAN	-	6.456.956.723	6.221.223.559	6.190.399.396	5.891.809.129	-	6.379.559.820	5.917.643.512	5.714.759.308	5.739.254.151	-	98,80%	95,12%	92,32%	97,41%

2.1.3.2 Kinerja Pelayanan Indikator Makro Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo memerlukan pemahaman mendalam atas capaian kinerja pelayanan publik pada periode sebelumnya. Analisis kinerja indikator makro ini bertujuan menilai sejauh mana efektivitas program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah, khususnya di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Urusan sosial memiliki mandat utama untuk meningkatkan cakupan perlindungan sosial masyarakat. Indikator makro utama yang digunakan untuk menilai kinerja urusan sosial meliputi:

Tabel 2.11
Kinerja Pelayanan Indikator Makro Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo

N o.	indikator Makro	Target Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Penduduk Miskin	7,1	7,41	7,39	7,35	7,3	7,43	7,44	6,65	6,48	6,18	95	99,60	110,01	111,84	118	IKU
2	Indeks Reformasi Birokrasi	71	70	71	72		67	6727	68,56	76,13		94	96,10	96,56	105,74		
3	Persentase PMKS	31,03	34	34	33,5	33	35	62,4	48,82	46,28	43,46	87	19,13	56,41	61,85	68	IKD
4	Indeks Pemberdayaan Gender	68,55	68,3	68,35	68,4	68,45	65,92	65,05	65,81	68,74	76,8	96	95,94	96,28	100,50	112	

2.1.3.3 Penerapan Standart Pelayanan Minimal (SPM)

1. Capaian SPM

Dengan ditetapkannya PP nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan ditindaklanjuti dengan peraturan menteri sosial nomor 9 tahun 2018 tentang standar teknis, maka kewenangan pelaksanaan rehabsos menjadi lebih efektif. Pelaksanaan pelayanan dasar SPM bidang sosial di kabupaten/kota, salah satu indikatornya adalah rehabilitasi sosial (rehabsos) dasar bagi penyandang disabilitas (PD) dengan kewenangan provinsi adalah rehabsos di dalam panti dan kewenangan kabupaten/kota adalah Rehabilitasi Sosial Dasar di luar panti.

Standar pelayanan pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota yaitu pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial dilakukan dalam bentuk layanan:

- a) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti;
- b) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti;
- c) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti;
- d) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dinas Sosial PPPA akan menjalankan program Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), konsep baru yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan dengan enam bidang utama: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Sosial. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Pelayanan sosial mencakup bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti pemberian bantuan sosial, pendampingan kasus sosial, dan pengembangan kegiatan sosial lainnya. Dengan mengintegrasikan enam bidang SPM ini, Posyandu diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih komprehensif dan berdampak positif bagi masyarakat. Konsep ini juga

diharapkan dapat meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Di bawah ini adalah Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Probolinggo Tahun 2024.

Tabel 2.12

Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Probolinggo Tahun 2024

N O	KELUARAN (OUTPUT)	SATUA N	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMB ER DANA
			VOLU ME	RP	VOLU ME	RP	%		
							FISI K	KEUANG AN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyediaan permakanan	Orang	324	769.298.114	325	723.005.360	100	90	Insentif Fiskal
2	Penyediaan sandang	Orang	182	78.447.100	280	74.338.000	100	100	Insentif Fiskal
3	Penyediaan alat bantu	Orang	19	144.725.000	21	55.000.000	100	100	Insentif Fiskal
4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	76	4.550.000	101	2.000.000	100	100	DAU
5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	280	192.050.000	285	12.000.000	100	100	DAU

6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlanjar, anak terlanjar, lanjut usia terlanjar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	280	7.875.000	276	19.157.085	100	99	DAU
7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	56	-	57	511.000	100	100	DAU
8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	111	65.550.000	115	250.000	100	100	DAU
9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	324	-	255	800.000	100	96	DAU
10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	4	-	4	1.500.000	100	98	DAU
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	81	4.350.000	115	2.000.000	100	100	DAU
12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	51	6.250.000	76	2.000.000	100	100	DAU
TOTAL				1.273.095.214		892.561.445			

2. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Urusan Sosial oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13

**Alokasi Anggaran yang mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM
Urusan Sosial pada Dinas Sosial PPPA Tahun anggaran 2024**

No	Pendanaan	Pagu Anggaran
1.	APBD	
	• APBD MURNI	-
	• APBD DAU	565.795.214,00
	• APBD DAK FISIK	-
	• APBD DAK NON FISIK	-
	• DANA BAGI HASIL	-
	• KERJASAMA	-
	• OTONOMI KHUSUS	-
2	NON APBD	
	CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	-
3	APBN	
	A. PBN-DEKONSENTRASI	-
	B. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	-
4	DANA LAINNYA	921.600.000,00
JUMLAH		1.487.395.214,00

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan perangkat daerah adalah masyarakat atau individu yang secara langsung menerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Penentuan kelompok sasaran didasarkan pada kebutuhan spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Tujuannya adalah agar setiap layanan yang diberikan tepat sasaran dan mampu menjawab permasalahan atau kebutuhan nyata masyarakat.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki kelompok sasaran layanan yang spesifik, fokus pada upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berikut adalah beberapa kelompok

sasaran yang biasanya menjadi fokus dalam layanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

1) Pemerlu Atensi Sosial (PAS):

Kelompok ini terdiri atas individu dan keluarga yang mengalami keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta berada dalam kondisi rawan sosial.

- a) Fakir miskin
- b) Anak-anak rentan
- c) Difabel
- d) Lansia terlantar
- e) Mereka yang berpendapatan rendah
- f) Korban bencana
- g) Kelompok afirmatif
- h) Warga binaan
- i) Korban kekerasan
- j) Korban Napza dan HIV/AIDS
- k) Mereka yang bermasalah sosial
- l) Perempuan rentan

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka memberikan layanan pada kelompok ini antara lain, Program rantang sehat bagi lansia terlantar, pemberian sembako pada anak yatim dan atau piatu serta eks NAPI, pemberian alat bantu untuk disabilitas/lansia terlantar, pemberian permakanan untuk korban banjir, pemberian BLT, bansos berupa bantuan peralatan usaha, operasional Shelter.

2) Perempuan dan Anak dalam Situasi Khusus

Sebagai bagian dari perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, Dinsos PPPA memberikan perhatian khusus terhadap:

- a) Perempuan korban kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, dan diskriminasi
- b) Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), seperti anak korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak

jalanan, anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual, serta anak dengan HIV/AIDS

- c) Perempuan kepala keluarga yang mengalami kerentanan ekonomi dan sosial
- d) Korban perdagangan orang (trafficking), khususnya perempuan dan anak

Layanan yang diberikan kepada kelompok ini antara lain, penyediaan rumah aman untuk korban KDRT, layanan Pusat Pembelajaran Keluarga, pelatihan usaha untuk Perempuan.

3) Masyarakat Umum dalam Konteks Pemberdayaan:

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sosial dan ekonomi melalui:

- a) Kelompok usaha bersama masyarakat (KUBE), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan kelompok pemberdayaan ekonomi lainnya.
- b) Kader Posyandu, kelompok PKK, serta organisasi lokal yang aktif dalam pembangunan berbasis masyarakat.
- c) Peningkatan kesetaraan gender dan melibatkan aktif perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Kegiatan layanan yang disasarkan pada kelompok masyarakat ini antara lain reward RT/RW/LPM, kegiatan bulan bakti gotong royong.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

1. Lembaga dan Organisasi Mitra

Dalam upaya memperkuat jejaring dan keberlanjutan layanan, Dinsos PPPA juga menyasar lembaga-lembaga pendukung, antara lain:

- a) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
- b) Organisasi perempuan dan organisasi masyarakat sipil di bidang sosial dan pemberdayaan
- c) Forum Anak, Forum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dan lembaga perlindungan lainnya

- d) Dunia usaha dan lembaga filantropi yang berperan dalam program-program Corporate Social Responsibility (CSR).

Dalam memberikan pelayanan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai mitra kerja sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 3) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 4) Satuan Polisi Pamong Praja;
- 5) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 6) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan 11 UPT di bawah naungannya;
- 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur;
- 8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
- 9) Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya;
- 10) Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Kabupaten Malang;
- 11) Polres Probolinggo Kota terkait Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- 12) Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo terkait dengan Rehabilitasi Anak Korban NAPZA.

2. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial PPPA:

- 1) Kepolisian Resor Probolinggo Kota
- 2) Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo
- 3) KC BULOG Kota Probolinggo.
- 4) BPJS Kesehatan (PBI JKN)
- 5) BAZNAS Kota Probolinggo

2.2 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, serta penyusunan program dan keuangan.

Dari implementasi fungsi Sekretariat, beberapa masalah yang menjadi kendala/masalah dalam proses pelayanan sosial antara lain:

- a) Kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan Dinas Sosial PPPA belum optimal;
- b) Sarana prasarana yang terbatas serta perlu rehabilitasi dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial.

2. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan sosial, pengelolaan taman makam pahlawan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

Beberapa masalah yang menjadi kendala/masalah dalam proses pelayanan sosial antara lain:

- a) Kualitas data tentang kondisi sosial masyarakat yang diberdayakan kurang akurat;
- b) Masyarakat lebih terbiasa menerima bantuan (*charity-based*) dibanding program yang meningkatkan kemandirian (*empowerment-based*);
- c) Pemberdayaan ekonomi di lembaga kesejahteraan sosial (LKS) masih rendah;
- d) Kurangnya tenaga profesional yang memahami pemberdayaan sosial;
- e) Kurang optimalnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta;
- f) Keterbatasan anggaran dalam pengelolaan TMP serta minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga TMP;

- g) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat relatif rendah;
- h) Kurangnya keterampilan (*skills*) dan pengetahuan dasar yang dibutuhkan untuk mengembangkan potensi ekonomi atau sosial masyarakat.

3. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan tugas di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana dan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan.

Masalah yang menjadi kendala/masalah dalam proses pelayanan sosial antara lain:

- a) Krisis pangan dan kenaikan harga bahan pangan memperburuk kemiskinan dan ketimpangan sosial;
- b) Keterbatasan Sumber Daya: Fasilitas, tenaga kerja sosial, serta anggaran sering kali tidak mencukupi untuk menjangkau seluruh penerima manfaat;
- c) Stigma Sosial: Masyarakat masih memiliki pandangan negatif terhadap kelompok yang membutuhkan rehabilitasi sosial, seperti penyandang disabilitas, lansia terlantar, anak jalanan, dan korban kekerasan;
- d) Validitas dan Akurasi Data Penerima Bantuan: Terjadi beberapa kasus di mana data penerima bantuan tidak diperbarui, sehingga menyebabkan ketidaktepatan dalam distribusi bantuan sosial;
- e) Tingkat Ketergantungan yang Tinggi: Beberapa penerima bantuan menjadi bergantung pada jaminan sosial tanpa adanya program pemberdayaan yang berkelanjutan;
- f) Kurangnya Kesiapsiagaan dan Mitigasi: Belum adanya sistem kesiapsiagaan yang optimal, termasuk peringatan dini dan rencana evakuasi. Ketika bencana terjadi, koordinasi antar instansi sering kali

kurang efektif, mengakibatkan keterlambatan dalam respons tanggap darurat;

- g) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana alam dan sosial;
- h) Jumlah PPKS di luar panti cenderung mengalami peningkatan.

4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak, melaksanakan tugas di bidang perlindungan perempuan, Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan perlindungan khusus anak.

Beberapa masalah yang menjadi kendala antara lain:

- a) kemiskinan dan ketimpangan sosial akibat krisis pangan meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender;
- b) Masih terdapatnya kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan anak, dan pekerja anak;
- c) Keterbatasan Layanan Perlindungan rendahnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, termasuk dalam mencegah eksploitasi dan kekerasan;
- d) Kurangnya pemahaman tentang hak anak di masyarakat, termasuk di lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
- e) Koordinasi antar lembaga yang belum optimal;
- f) Masih adanya kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan, melaksanakan tugas di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, dan pengelolaan sistem data gender dan anak.

Beberapa masalah yang menjadi kendala antara lain:

- a) Pengarusutamaan Gender (PUG) yang Belum Optimal karena kurangnya pemahaman dan komitmen dari lembaga pemerintah daerah dalam mengimplementasikan PUG;
- b) Keterbatasan Pemberdayaan Perempuan di berbagai bidang;

- c) Partisipasi perempuan dalam politik masih rendah, menghadapi diskriminasi dalam mendapatkan akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum, masih adanya stereotip gender yang membatasi perempuan dalam berperan aktif di masyarakat, Keterbatasan akses modal, pelatihan, dan jaringan usaha bagi perempuan;
- d) Peningkatan kualitas keluarga yang belum merata;
- e) Ketimpangan peran gender dalam keluarga masih tinggi, dengan perempuan sering terbebani pekerjaan domestik tanpa dukungan yang memadai;
- f) Kurangnya sistem yang terintegrasi untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data gender dan anak di tingkat daerah;
- g) Masih adanya resistensi dari masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap program pemberdayaan perempuan karena faktor budaya dan sosial;
- h) Masih banyak perempuan yang tidak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang layak, yang berdampak pada keterbatasan peluang kerja dan ekonomi;
- i) Terbatasnya sarana prasarana ruang publik yang aman dan ramah untuk perempuan dan anak.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, maka Dinas Sosial PPPA berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan dan isu strategis yang ada.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta merujuk pada dokumen RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan

menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.14
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah (TB 35)

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Urusan Sosial			
1	Kualitas pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat masih rendah	Kualitas data tentang kondisi sosial masyarakat yang diberdayakan kurang akurat	Belum adanya basis data sosial yang terintegrasi dan terbaru secara berkala
		Pemberdayaan ekonomi di lembaga kesejahteraan sosial (LKS) masih rendah	Keterbatasan kapasitas dan akses ekonomi di LKS
		Kurang optimalnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta	Koordinasi lintas sektor belum berjalan efektif
		Masyarakat lebih terbiasa menerima bantuan (charity-based) dibanding program yang meningkatkan kemandirian (empowerment-based)	Pola pikir masyarakat yang masih bergantung pada bantuan
		Kurangnya keterampilan (skills) dan pengetahuan dasar yang dibutuhkan untuk mengembangkan potensi ekonomi atau sosial masyarakat	Minimnya program pelatihan keterampilan dan pendampingan
		Keterbatasan anggaran dalam pengelolaan Taman Makam Pahlawan serta minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga Taman Makam Pahlawan	Dukungan anggaran terbatas dan kesadaran masyarakat masih rendah terhadap nilai historis dan sosial Taman Makam Pahlawan
2	Kerentanan sosial akibat keterbatasan	Krisis pangan dan kenaikan harga bahan pangan memperburuk kemiskinan dan ketimpangan sosial	Gejolak harga pangan dan keterbatasan akses distribusi

	sumber daya, dan bencana	Keterbatasan Sumber Daya: Fasilitas, tenaga kerja sosial, serta anggaran sering kali tidak mencukupi untuk menjangkau seluruh penerima manfaat	Sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas
		pandangan negatif terhadap kelompok yang membutuhkan rehabilitasi sosial, seperti penyandang disabilitas, lansia terlantar, anak jalanan, dan korban kekerasan	Stigma sosial yang masih kuat terhadap kelompok rentan
		penerima bantuan menjadi bergantung pada jaminan sosial tanpa adanya program pemberdayaan yang berkelanjutan	Program perlindungan sosial kurang terintegrasi dengan pemberdayaan
		Belum adanya sistem kesiapsiagaan yang optimal, termasuk peringatan dini dan rencana evakuasi	Sistem mitigasi bencana belum komprehensif
			Koordinasi instansi pemerintah dalam penanggulangan bencana belum solid
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana alam dan sosial	Edukasi kesiapsiagaan bencana belum merata
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak			
	Tingginya kasus kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak anak	kemiskinan dan ketimpangan sosial akibat krisis pangan meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender	Tekanan ekonomi keluarga meningkatkan kerentanan anak dan perempuan
		Masih terdapatnya kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan anak, dan pekerja anak	Budaya patriarki dan norma sosial yang membiarkan kekerasan dalam rumah tangga
		Keterbatasan Layanan Perlindungan rendahnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, termasuk dalam mencegah eksploitasi dan kekerasan	Sistem perlindungan anak belum melibatkan masyarakat secara optimal

		Kurangnya pemahaman tentang hak anak di masyarakat, termasuk di lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha	Edukasi tentang hak anak belum masif
		Masih adanya kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus	Mekanisme perlindungan khusus anak masih terbatas
Urusan Pemberdayaan Masyarakat			
	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat relatif rendah	Kurangnya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk terlibat
			Kurangnya pendekatan partisipatif dalam program
			Minimnya insentif dan keberlanjutan program

2.2.2 Isu Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo perlu didasarkan pada identifikasi isu-isu strategis yang berkembang. Isu strategis merupakan permasalahan mendasar atau tantangan penting yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, serta berdampak pada pencapaian pembangunan daerah secara menyeluruh.

Analisis isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain kondisi internal organisasi, dinamika eksternal, capaian kinerja sebelumnya, kebutuhan masyarakat, kebijakan nasional dan daerah, serta tren sosial, ekonomi dan lingkungan. Faktor yang menjadi pertimbangan lainnya adalah tentang pengarusutamaan gender. Yaitu dukungan pemerintah pusat hingga daerah terhadap penyelesaian kesenjangan gender yang diterapkan dengan perencanaan anggaran yang responsif gender.

Melalui identifikasi dan perumusan isu strategis yang tepat, perangkat daerah diharapkan mampu merumuskan strategi dan program yang lebih terarah, efektif, dan adaptif terhadap perubahan.

Oleh karena itu, pada bagian ini disajikan ringkasan isu-isu strategis yang menjadi perhatian utama perangkat daerah selama periode Renstra. Isu-isu strategis tersebut dirumuskan untuk menjadi dasar dalam penetapan strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara terpadu dan berkelanjutan.

Berdasarkan pemaparan gambaran pelayanan PD dari segi tugas pokok dan fungsi, evaluasi kinerja pelaksanaan urusan pada masa lampau, serta identifikasi permasalahan, penyelenggaraan urusan pada Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo, maka dilakukan analisis dan mendapatkan Isu Strategis PD yang berkaitan dengan urusan melibatkan kebijakan dan program-program untuk 5 tahun kedepan. Berikut adalah beberapa isu strategis yang relevan:

Tabel 2.15

Teknik menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Pemerintah Kota Probolinggo mempunyai Relawan Sosial: Tagana (Taruna Siaga Bencana), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) yaitu relawan sosial yang berasal dari masyarakat, memiliki kepedulian, dan aktif dalam penanggulangan bencana dan perlindungan sosial	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana alam dan sosial	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Perubahan iklim dan peningkatan frekuensi bencana alam global	Prioritas nasional dalam ketahanan bencana dan sistem perlindungan sosial	Upaya Pengendalian lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim untuk meningkatkan resiliensi dan ketahanan pangan daerah	Penguatan kapasitas dan penyebaran relawan sosial dalam mitigasi bencana
	Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup kelompok rentan melalui intervensi sosial, ekonomi, dan layanan dasar		Ketimpangan ekonomi dan sosial antar negara	Penguatan perlindungan sosial dan pemberdayaan kelompok rentan	Pembangunan inklusif yang didukung usaha Pemenuhan hak-hak masyarakat rentan	Optimalisasi layanan sosial berbasis data untuk kelompok rentan

• Terdapat Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang tersebar di wilayah Kota Probolinggo • Panti Sosial/ Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang yang berkontribusi dalam pelayanan sosial, termasuk anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, dll. • Di setiap kelurahan terdapat LKK yang dapat digerakkan dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) yang memiliki potensi dalam mendampingi keluarga penerima bantuan sosial agar mandiri	Tingginya harapan masyarakat untuk mendapatkan jaminan sosial dan perlindungan sosial		<i>Global call for social protection and inclusive development</i>	Prioritas nasional pada jaminan sosial universal		Pengembangan sistem jaminan sosial yang inklusif dan adaptif
	Belum optimalnya implementasi pengarusutamaan gender (PUG)	Meningkatkan Kualitas SDM (Kesehatan, Kesejahteraan dan Pendidikan)	SDGs: Kesetaraan Gender (Goal 5) dan Empowerment	Pengarusutamaan gender dalam RPJMN dan reformasi birokrasi	Pembangunan inklusif yang didukung usaha Pengarusutamaan Gender	Percepatan pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) di tingkat lokal
	Belum optimalnya perlindungan dan pemenuhan hak anak		Konvensi Hak Anak (CRC), perhatian dunia pada perlindungan anak	Penguatan sistem perlindungan anak nasional		Penguatan sistem perlindungan anak terpadu berbasis komunitas
	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat relatif rendah		Urbanisasi dan transformasi partisipasi publik global	Masyarakat sebagai mitra dalam pembangunan sosial	Pemerintahan yang bersih, adaptif serta berorientasi layanan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan sosial berbasis kelurahan

• Dinas Sosial PPPA memiliki UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak • Terdapat Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) • Bekerjasama dengan jejaring yang dapat menjadi mitra dalam mengimplementasikan program pemberdayaan perempuan						
--	--	--	--	--	--	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Menteri diotonomikan ke Daerah. Sebagai konsekuensi dari Menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban Menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Agar tercipta hubungan antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat berwenang menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan dan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dalam melaksanakan urusan pemerintah berpedoman pada NSPK yang ditetapkan.

Berikut NSPK Peraturan Pemerintah yang terkait dengan Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat yang telah ditetapkan antara lain namun tidak terbatas pada:

No	NSPK Bidang Sosial
1	Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
2	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional
3	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penggunaan Beras Reguler dalam Penanggulangan Bencana
4	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Sosial
5	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penggunaan Atribut pada Bantuan Sosial dalam Penanggulangan Bencana

6	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Aplikasi Sistem Online Pelayanan Perizinan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
7	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial
8	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berhadapan dengan Hukum di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial
9	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum
10	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan Dalam Penanggulangan Bencana
11	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil
12	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online
14	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Dengan Sistem Online
15	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
16	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional
17	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional
18	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelayanan Sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas
19	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana
20	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama
21	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Hadiah Tidak Tertebak dan/atau Tidak Diambil Pemenang atas Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah
22	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial

23	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
24	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota
25	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Intensitas dan Beban Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
26	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
27	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
28	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial
29	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
30	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Restorasi Sosial
31	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas
32	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan
33	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
34	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan
35	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
36	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia
37	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
38	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial
39	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Agensi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah
41	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
42	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

43	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial
44	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan
45	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
46	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
47	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum
48	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan bagi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
49	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
50	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental
51	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai
52	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial melalui Sistem Pembelajaran Secara Elektronik
53	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di daerah Kabupaten/Kota
54	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Orang dengan Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome
55	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
56	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
57	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak
58	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak
59	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna
60	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana

61	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
62	Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial
63	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
64	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat
65	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Surat Keterangan Pelatihan, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Akreditasi
66	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
67	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Hadiah Tidak Tertebak dan/atau Tidak Diambil Pemenang atas Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah
68	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin
69	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Hadiah Tidak Tertebak dan/atau Hadiah Tidak Diambil Pemenang atas Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah
70	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai
71	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah
72	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
73	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
74	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional
75	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Registrasi dan Izin Praktik Pekerja Sosial
76	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial
77	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial
78	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban

79	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha
80	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar
81	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak
82	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
83	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial
84	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang
85	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan
86	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako
87	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah
88	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial

No	NSPK Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2	Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
3	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4	Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga sejahtera
5	Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.
6	Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Lanjut Usia
7	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

9	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.
11	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
13	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
14	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15	Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
16	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
17	Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
18	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
19	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606;
20	UU 4/2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan
21	Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Anak.
22	Keputusan Presiden Nomor 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk – bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
23	Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
24	Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
25	Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak.

26	Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan di Daerah
27	Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak.
28	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
29	Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
30	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
31	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
32	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Data Terpilah Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Yang Responsif Gender;
33	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak
34	Keputusan Menteri Koordinator dan Kesejahteraan Rakyat Nomor 25 Tahun 2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak;
35	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Peranan Wanita di Daerah

3.1 TUJUAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan pembangunan adalah hasil akhir yang ingin dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Kota Probolinggo. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, Pancasila, Undang-Undang Kesejahteraan Sosial.

Sebagai Dinas yang mengurus bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo akan melaksanakan 1 (satu) dari 5 (lima) Misi Pemerintah yaitu misi ke 2 (dua).

Gambar 3.1
Cascading Misi II RPJMD Kota Probolinggo 2025 – 2029



Gambar III-8 Cascading Misi II RPJMD Kota Probolinggo 2025-2029
Sumber: Diolah, 2025

Adapun tujuan pelaksanaan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dalam rangka merealisasikan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Probolinggo tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

Sasaran RPJMD	: Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesetaraan Gender
Tujuan PD	: Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesetaraan Gender

3.2 SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun sasaran perangkat daerah merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategis

perangkat daerah. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai perangkat daerah dalam kurun waktu tertentu. Sasaran pembangunan adalah target spesifik yang ingin dicapai sebagai bagian dari tujuan pembangunan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah:

Tujuan PD	: Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesetaraan Gender
Sasaran PD	: 1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Inklusif 2. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 3. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak 4. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel

Berdasarkan analisis dan pendekatan sebagaimana tersebut diatas, maka pernyataan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NSPK: PERWALI KOTA PROBOLINGGO NO. 79 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan	Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesenjangan Gender		Persentase Penurunan PMKS/PPKS	9,193%	9,596%	10,001%	10,467%	10,875%	11,284%	
			Indeks Pembangunan Gender	97,5	97,78	97,95	98,15	98,38	98,5	
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Inklusif	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	90,25%	90,30%	90,35%	90,40%	90,45%	90,50%	

Jaminan Sosial melaksanakan tugas di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana dan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan; Bidang Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan sosial, pengelolaan taman makam pahlawan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat; Bidang Pemberdayaan Perempuan, melaksanakan tugas di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase Kelompok Masyarakat yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Ketimpangan Gender	0,248	0,239	0,23	0,222	0,214	0,207	
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	70,9	72,1	73,3	74,5	75,7	76,9	
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	84,39	84,69	84,99	85,29	85,59	85,89	

perempuan, peningkatan kualitas keluarga, dan pengelolaan sistem data gender dan anak; Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak, melaksanakan tugas di bidang perlindungan perempuan, Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan perlindungan khusus anak SASARAN RPJMD: PERLUASAN CAKUPAN PERLINDUNGAN SOSIAL, KEMANDIRIAN MASYARAKAT DAN KESETARAAN GENDER										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.3 STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintahan secara sinergis, efektif dan efisien serta mendeteksi faktor-faktor penentu lainnya. Secara internal faktor-faktor keberhasilan dapat dilihat melalui pendekatan Tugas dan fungsi perangkat daerah, kondisi Sumber Daya Manusia, Kondisi data, kemampuan penguasaan teknologi, Kemampuan dana, kemampuan sarana dan prasarana serta etos kerja.

- a. Penguatan program perlindungan sosial bagi kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, dll).
- b. Perluasan akses layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan.
- c. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program sosial.
- d. Integrasi data kesejahteraan sosial untuk memudahkan penyaluran bantuan yang tepat sasaran
- e. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan organisasi masyarakat.
- f. Pelatihan dan pendampingan teknis bagi lembaga lokal.
- g. Fasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan dan pemerintah.
- h. Penguatan regulasi dan pendanaan untuk organisasi masyarakat sipil
- i. Kampanye dan edukasi publik mengenai kesetaraan gender dan hak anak.
- j. Penegakan hukum terhadap kekerasan berbasis gender dan perlindungan anak.
- k. Peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat lokal maupun nasional.
- l. Penyediaan layanan pengaduan dan perlindungan bagi korban kekerasan

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (TC 26)

Visi : Mewujudkan Kota Probolinggo yang Tangguh, Berkelanjutan, Sejahtera, Modern, dan Adaptif			
Misi : Akselerasi Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pemajuan Kebudayaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Inklusif	Penguatan layanan rehabilitasi sosial terpadu berbasis data akurat	Penguatan sistem layanan sosial inklusif dan peningkatan kapasitas SDM pelaksana rehabilitasi sosial
		Penanaman dan internalisasi nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat	Penguatan program edukasi dan sosialisasi nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial serta Pengelolaan TMP
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program sosial	Pengembangan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk mendukung kesejahteraan sosial
	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Pengarusutamaan gender dalam penyusunan program pembangunan	Penetapan kebijakan dan program pemberdayaan perempuan berbasis responsif gender
		Penyediaan layanan perlindungan perempuan dan anak yang mudah diakses dan responsif	Penguatan kelembagaan layanan perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan kapasitas tenaga pendamping
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang transparan dan partisipatif	Penguatan sistem monitoring dan evaluasi serta peningkatan kapasitas aparatur dalam pelayanan sosial

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD disajikan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
URUSAN SOSIAL				
Peningkatan Akurasi Penyaluran Bantuan Sosial Sesuai dengan Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)	Penguatan Layanan Intervensi Spesifik bagi PPKS	Integrasi Program Bantuan dengan Program Pemberdayaan Berbasis Komunitas	Peningkatan Kemitraan dan Kolaborasi Multipihak	Monitoring, Evaluasi, dan Reformulasi Program Penanganan PPKS
URUSAN PPPA				
Optimalisasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan pada Perencanaan dan Penganggaran	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Data Terpadu untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program secara efektif dan efisien	Peningkatan Sinergi dan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Penguatan Kapasitas Dasar Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas Teknis dan Kemandirian Program	Konsolidasi dan Kolaborasi Lintas Lembaga	Kemandirian dan Keberlanjutan Lembaga Kemasyarakatan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo menetapkan arah pembangunan tahunan yang disusun secara bertahap dan berkelanjutan. Adapun tahapan pembangunan dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Urusan Sosial

1) Tahap I: Peningkatan Akurasi Penyaluran Bantuan Sosial Sesuai dengan Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

Tahap awal pembangunan difokuskan pada peningkatan akurasi penyaluran bantuan sosial melalui perbaikan dan pembenahan data sosial ekonomi masyarakat berbasis DTSEN. Kegiatan pada tahap ini mencakup verifikasi dan validasi data secara berkala, pemutakhiran data penerima manfaat, serta peningkatan kapasitas sistem informasi kesejahteraan sosial yang terintegrasi dengan platform DTSEN. Langkah ini menjadi fondasi utama untuk memastikan bahwa bantuan sosial diterima oleh masyarakat miskin dan rentan secara tepat sasaran dan tepat waktu.

2) Tahap II: Penguatan Layanan Intervensi Spesifik bagi PPKS

Tahap kedua diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pelaksana program sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini mencakup pelatihan teknis bagi petugas pendamping sosial, peningkatan koordinasi lintas sektor, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) penyaluran bantuan, serta pembentukan tim verifikasi yang profesional dan responsif. Tujuan dari tahap ini adalah menciptakan tata kelola program bantuan sosial yang lebih efisien, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat.

3) Tahap III: Integrasi Program Bantuan dengan Program Pemberdayaan Berbasis Komunitas

Tahap ketiga menekankan pada integrasi antara bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi produktif yang berbasis komunitas. Tujuannya adalah menciptakan kemandirian sosial-ekonomi bagi kelompok PPKS melalui pelatihan, pendampingan usaha, bantuan modal, serta pengembangan jejaring usaha mikro dan koperasi sosial.

4) Tahap IV: Peningkatan Kemitraan dan Kolaborasi Multipihak

Pada tahap keempat, Dinas Sosial akan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam rangka mengintegrasikan bantuan sosial dengan program-program strategis lainnya, seperti pemberdayaan ekonomi, akses pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Pendekatan ini dilakukan agar bantuan sosial tidak

hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif, sehingga mampu mendorong kemandirian ekonomi keluarga miskin dan mendukung percepatan penghapusan kemiskinan secara menyeluruh.

- 5) Tahap V: Monitoring, Evaluasi, dan Reformulasi Program Penanganan PPKS
Tahap akhir pembangunan difokuskan pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas dan dampak dari seluruh program bantuan sosial. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar dalam melakukan reformulasi kebijakan sosial berbasis data DTSEN, agar program yang disusun dapat lebih adaptif, berkelanjutan, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, akan dikembangkan mekanisme umpan balik dari masyarakat guna meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat akuntabilitas publik.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Tahap I: Optimalisasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak.
Tahap awal yang dilakukan adalah meningkatkan layanan perlindungan bagi korban kekerasan melalui penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 2) Tahap II: Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan pada Perencanaan dan Penganggaran
Tahap kedua dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
- 3) Tahap III: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Tahap ketiga, mendorong keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat desa dan kelurahan serta memberdayakan perempuan melalui pelatihan keterampilan dan akses terhadap sumber daya ekonomi.
- 4) Tahap IV: Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Data Terpadu untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program secara efektif dan efisien
Pada tahap keempat, mengembangkan dan memanfaatkan data terpilah berdasarkan jenis kelamin untuk mendukung perencanaan dan evaluasi

program dan membangun sistem informasi yang mendukung pengumpulan dan analisis data gender.

5) Tahap V: Peningkatan Sinergi dan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

Tahap akhir, menjalin kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan media untuk mendukung program kesetaraan gender dan perlindungan anak.

c. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

1) Tahap I: Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan pemetaan dan pendataan seluruh LKK menyusun rencana strategis penguatan yang dilanjutkan dengan sosialisasi peran strategis LKK.

2) Tahap II: Penguatan Kapasitas Dasar LKK

Tahap kedua dilakukan dengan memastikan legalitas kelembagaan, pelatihan dasar tata kelola, administrasi, dan keuangan dan Penataan struktur organisasi LKK agar efektif dan inklusif.

3) Tahap III: Peningkatan Kapasitas Teknis dan Kemandirian Program

Tahap ketiga, melakukan pelatihan teknis perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan, Fasilitasi pengelolaan program secara mandiri, dan Penguatan jejaring dan kemitraan LKK dengan pihak ketiga.

4) Tahap IV: Konsolidasi dan Kolaborasi Lintas Lembaga

Pada tahap keempat, Penguatan koordinasi antar-LKK dan dengan kelurahan lebih ditingkatkan. Pelibatan aktif dalam Musrenbang dan pengawasan Pembangunan, dan membentuk Forum kolaborasi dan sinergi antar lembaga.

5) Tahap V: Kemandirian dan Keberlanjutan Lembaga Kemasyarakatan

Tahap kelima, dilakukan Kaderisasi dan pelatihan kepemimpinan LKK, dorongan untuk usaha/kegiatan produktif Masyarakat dan membangun Sistem evaluasi dan penghargaan bagi LKK.

3.4 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pendoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran.

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD agar tercapai peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat yang inklusif, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, perlindungan perempuan dan anak secara lebih optimal, serta meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel

Melalui perumusan arah kebijakan yang sistematis ini, diharapkan setiap Perangkat Daerah dapat menghasilkan Renstra PD yang koheren, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah kebijakan yang tepat akan menjadi fondasi yang kuat bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029, serta berkontribusi optimal terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5
1	PERWALI KOTA PROBOLINGGO NO. 79 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO	Pemberdayaan, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial terintegrasi dan inklusif berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)	Penguatan sistem layanan sosial inklusif dan peningkatan kapasitas SDM pelaksana rehabilitasi sosial	
3	Bidang Rehabilitasi Sosial,	Penguatan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Penguatan program edukasi dan sosialisasi nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	

	Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan tugas di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana dan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;		serta Pengelolaan TMP	
4	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan sosial, pengelolaan taman makam pahlawan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;	Penguatan kapasitas dan partisipasi kelompok masyarakat serta lembaga kemasyarakatan, termasuk kelompok rentan dalam pembangunan daerah dan dukungan pencapaian SPM	Pengembangan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk mendukung kesejahteraan sosial	
5		Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pengarusutamaan gender dan inklusi sosial serta perlindungan dan pemenuhan hak anak	Penetapan kebijakan dan program pemberdayaan perempuan berbasis responsif gender	
6	Bidang Pemberdayaan Perempuan, melaksanakan tugas di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, dan pengelolaan sistem data gender dan anak; Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak, melaksanakan tugas di bidang perlindungan perempuan, Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan perlindungan khusus anak		Penguatan kelembagaan layanan perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan kapasitas tenaga pendamping	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, serta pendanaan indikatif. Program yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Probolinggo merupakan program prioritas yang ada di RPJMD Tahun 2025 – 2029 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinsos PPPA. Rencana program serta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029, selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah yang ada pada Dinsos PPPA Kota Probolinggo. Penelaahan ini mencakup pemahaman terhadap “Asta Cita” yaitu visi dan misi pembangunan nasional yang menjadi landasan bagi seluruh kebijakan pemerintah:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Probolinggo mendukung Asta Cita ke 4 yaitu Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Terkait dengan Astacita tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mewujudkannya melalui misi utama Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang disebut dengan "Nawa Bhakti Satya":

1. **Jatim Sejahtera**
Mempercepat pengentasan kemiskinan di desa dan kota melalui pendekatan Lintas sektoral-spasialterpadudengan memperkuat peran kaum perempuan dalam program pemberdayaan serta memprioritaskan warga miskin di kelompok rentan diantaranya difabel dan lansia melaluim program bantuan dan perlindungan sosial berbasis data terpadu.
2. **Jatim Kerja**
Memperluas Lapangan kerja yang berkuaLitas melalui peningkatan kewirausahaan baru (start-up), pengembangan ekonomi kreatif, iklim investasi, stabilitas ekonomi serta pengendalian harga kebutuhan pokok, dan penguasaan keterampilan abad 21 (*21st Century Skills*) yang berdaya saing.
3. **Jatim Cerdas**

Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses Pendidikan untuk semua (Education for all) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.

4. Jatim Sehat

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (health for all) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan universal health coverage (UHC).

5. Jatim Akses

Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur lintas sektor serta transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan.

6. Jatim Berkah – Amanah

Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya guna, dan anti korupsi serta memperkuat kesalehan sosial masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan, budi pekerti luhur, dan berjiwa Pancasila.

7. Jatim Agro

Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dengan tata niaga yang berkeadilan, akses optimal kepada sarana produksi, pembiayaan, daya dukung infrastruktur pertanian untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penyangga ketahanan pangan nasional.

8. Jatim Harmoni

Menjaga terwujudnya Masyarakat yang harmonis melalui pengembangan nilai-nilai toleransi, keadilan dalam keberagaman, pengarusutamaan gender, serta memajukan seni budaya dan prestasi olahraga.

9. Jatim Lestari

Menjaga kelestarian lingkungan hidup demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan selaras dengan daya dukung alam dan lingkungan, serta mendorong pengembangan ekonomi hijau dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan lintas sektoral.

Dalam mencapai Astacita dan Nawa Bhakti Satya, Pemerintah Kota Probolinggo mewujudkannya melalui visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo yang disebut dengan “Panca Artha”.

Gambar 4.1
Visi Kota Probolinggo 2025 – 2029



Misi Pembangunan Daerah 2025 – 2029 terdiri dari:

1. Penguatan Kualitas SDM sebagai modal dasar pembangunan;
2. Akselerasi penanganan masalah kesenjangan sosial dan kemajuan kebudayaan;
3. Ekonomi inklusif berbasis potensi lokal daerah yang didukung integrasi ekonomi digital;
4. Birokrasi Adaptif, modern dan berorientasi layanan;
5. Akelerasi pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi yang berwawasan lingkungan.

Dinsos PPPA Kota Probolinggo memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung terwujudnya misi ke-2 yaitu Akselerasi penanganan masalah kesenjangan sosial dan kemajuan kebudayaan. Misi ini menekankan pentingnya perlindungan sosial, kemandirian masyarakat dan kesetaraan gender bagi seluruh kelompok masyarakat. Oleh karena itu, Dinsos PPPA secara aktif melaksanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya penanganan masalah kesenjangan sosial di berbagai sektor. Dengan melaksanakan program-program tersebut, Dinsos PPPA Kota Probolinggo berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan misi ke 2 tersebut.

Untuk merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain target RPJMD, pagu indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan.

Berdasarkan kondisi Pembangunan Kesejahteraan Sosial saat ini, maka Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial PPPA dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
NSPK: PERWALI KOTA PROBOLINGGO NO. 79 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO Bidang	Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesenjangan Gender	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Inklusif			Persentase Penurunan PMKS/PPK		
					Indeks Pembangunan Gende		
					Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat rentan dan kelompok marjinal	1 Persentase pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar Panti Rehabilitasi Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
					2 Persentase pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA		

Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan tugas di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana dan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan sosial, pengelolaan taman makam pahlawan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat

				3 Persentase pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar		
				4 Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial		
				5 Persentase Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial		
				Persentase pengumpulan sumbangan dalam daerah yang difasilitasi	1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1.06.02.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
				Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	

hukum adat;

Bidang Pemberdayaan Perempuan, melaksanakan tugas di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, dan pengelolaan sistem data gender dan anak;

Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak, melaksanakan tugas di bidang perlindungan perempuan, Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan perlindungan khusus anak

SASARAN RPJMD:

			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	1.06.02.2.03.0010 Fasilitas Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	
			Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	1.06.02.2.03.0011 Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitas dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0012 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
			Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	1.06.02.2.03.0013 Fasilitas Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga	1.06.02.2.03.0014 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan	

PERLUASAN
CAKUPAN
PERLINDUNGAN
SOSIAL,
KEMANDIRIAN
MASYARAKAT
DAN
KESETARAAN
GENDER

				Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	1.06.02.2.03.0015 Fasilitas Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	
				Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	1.06.02.2.03.0016 Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	
				Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	1.06.02.2.03.0017 Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Tersedianya layanan pengaduan, pemulangan, dan pemulihan bagi warga negara migran korban tindak kekerasan	1 Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
				2 Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani		
				Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi yang difasilitasi	1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	

			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.03.2.01.0003 Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Terlaksananya layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar, dan anak terlantar, gelandangan dan pengemis, serta PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA		1 Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			2 Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
			3 Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
			4 Persentase Gelandang dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
			5 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV / AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
			Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai	1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan	

			dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	

			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0014 Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	1.06.04.2.01.0015 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	
			Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0016 Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan	1.06.04.2.01.0017 Penyediaan Perbekalan Kesehatan	

			Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota		
			Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	1.06.04.2.01.0018 Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	
			Persentase PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan	
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0004 Penyediaan Sandang	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0005 Penyediaan Alat Bantu	

			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
			Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0009 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	

				Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
				Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0015 Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	
				Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	1.06.04.2.02.0016 Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	
				Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	1.06.04.2.02.0017 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Tersalurkannya bantuan sosial dan jaminan sosial bagi kelompok rentan	1 Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar 2 Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi 3 Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	

				Persentase anak terlantar diluar panti yang terfasilitasi	1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
				Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	
				Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.05.2.01.0002 Rujukan Anak-Anak Terlantar	
				Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.05.2.01.0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	
				Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	1.06.05.2.01.0004 Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	
				Persentase Data Fakir Miskin yang sudah diverifikasi dan validasi	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
				Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
				Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	1.06.05.2.02.0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

			Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0009 Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	
			Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	1.06.05.2.02.0010 Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Terlaksananya bantuan sosial darurat dan pemulihan pascabencana	1 Persentase korban bencana alam, sosial, dan / atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana 2 Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya 3 Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
				Persentase Korban Bencana alam dan Sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang	

			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial	
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0007 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
			Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
			Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	1.06.06.2.02.0003 Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	
			Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	1.06.06.2.02.0004 Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	

			Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	1.06.06.2.02.0005 Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	
			Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	1.06.06.2.02.0006 Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	
			Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	1.06.06.2.02.0007 Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	
			Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	1.06.06.2.02.0008 Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	
			Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	1.06.06.2.02.0009 Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	
			Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	1.06.06.2.02.0010 Fasilitasi Pemetaan Rawan Konflik Sosial	
			Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	1.06.06.2.02.0011 Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	
		Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Terselenggaranya pemeliharaan, perawatan, dan pengelolaan Taman Makam	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

			Pahlawan secara berkelanjutan			
				Persentase Sarana Prasarana TMP dalam kondisi baik	1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
				Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
				Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1.06.07.2.01.0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
				Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1.06.07.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
				Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1.06.07.2.01.0005 Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi		
		Meningkatnya kualitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat	Terlaksananya pelatihan dan pembinaan bagi Lembaga Kemasyarakatan,	Persentase fasilitas pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN	

		dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	2.13.05.2.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	
				Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,	

				Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.13.05.2.01.0004 Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2.13.05.2.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.13.05.2.01.0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2.13.05.2.01.0007 Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	2.13.05.2.01.0008 Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2.13.05.2.01.0009 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat	

					dan Kesejahteraan Keluarga	
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	2.13.05.2.01.0010 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2.13.05.2.01.0011 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak			Indeks Ketimpangan Gender		
				Indeks Perlindungan Anak (IPA)		
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Terlaksananya pelatihan dan integrasi PUG dalam perencanaan pembangunan	1 Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				2 Persentase Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender		
				Persentase program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	2.08.02.2.01.0010 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
			jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	2.08.02.2.01.0011 Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.0012 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	2.08.02.2.01.0013 Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
			jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	2.08.02.2.01.0014 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Persentase Peran Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial,	2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial,	

				ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan	dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	2.08.02.2.02.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
				Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi	2.08.02.2.02.0005 Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	2.08.02.2.02.0006 Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.02.0007 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	2.08.02.2.02.0008 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	

				jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	2.08.02.2.02.0009 Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang difasilitasi untuk penguatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan	2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	2.08.02.2.03.0007 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	2.08.02.2.03.0008 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
				jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.03.0009 monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	

				jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	2.08.02.2.03.0010 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	
				Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	2.08.02.2.03.0011 mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat kabupaten/kota.	
		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Terlaksananya layanan perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01.0003 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	

				Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01.0004 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	2.08.03.2.01.0005 Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	
				Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	2.08.03.2.01.0006 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	2.08.03.2.01.0007 Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Persentase Pengaduan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang difasilitasi	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0003 &layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	

				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0004 layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0005 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0006 layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0007 layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0009 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kapasitas kelembagaan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

				Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	2.08.03.2.03.0005 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	2.08.03.2.03.0006 Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
				jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	2.08.03.2.03.0007 pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
				jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	2.08.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	2.08.03.2.03.0009 Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan	Terlaksananya program penguatan ketahanan keluarga	Persentase Layanan Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Ketentuan	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	

		gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak				
				Persentase Fasilitas Perumusan dan Penguatan Kebijakan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	2.08.04.2.01.0004 Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	
				Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.04.2.01.0005 Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.04.2.01.0006 Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah	

					yang ditetapkan oleh pemerintah.	
				proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	2.08.04.2.01.0007 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang difasilitasi untuk penguatan dan pengembangan kapasitas	2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.04.2.02.0004 monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	2.08.04.2.02.0005 pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas	

					Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.04.2.02.0006 penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	2.08.04.2.02.0007 peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.04.2.02.0008 Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Persentase Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang difasilitasi sesuai dengan ketentuan	2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	2.08.04.2.03.0002 layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
				Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota	2.08.04.2.03.0003 layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	

					yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota	
				Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	2.08.04.2.03.0004 layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
				Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota	2.08.04.2.03.0005 Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
				Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	2.08.04.2.03.0006 Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tersedianya sistem data terpilah gender dan anak yang terintegrasi	Tingkat kemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan / atau penyusunan kebijakan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
				Persentase jenis data gender dan anak yang terkumpul	2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2.08.05.2.01.0003 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	

				Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	2.08.05.2.01.0004 Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	
				Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	2.08.05.2.01.0005 Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	
		Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Terlaksananya program perlindungan dan pemenuhan hak anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				Persentase Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha yang telah berperan serta dalam Pelembagaan PHA	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.0003 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia	2.08.06.2.01.0004 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan	

				Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.0005 Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.0006 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang difasilitasi	2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	2.08.06.2.02.0005 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	

				Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.02.0006 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	2.08.06.2.02.0007 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.02.0008 monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	2.08.06.2.02.0009 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah	Terlaksananya layanan pencegahan dan penanganan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus	1 Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif 2 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	

		lainnya terhadap anak				
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	
				Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	2.08.07.2.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	2.08.07.2.01.0008 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	2.08.07.2.01.0009 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	2.08.07.2.01.0010 Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	

			Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota	2.08.07.2.01.0011 Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang difasilitasi	2.08.06.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0009 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0010 layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0011 layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0012 layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0014 layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0015 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	
				jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	2.08.07.2.03.0009 koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	

				jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.03.0010 monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	2.08.07.2.03.0011 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.03.0012 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	2.08.07.2.03.0013 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	2.08.07.2.03.0014 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel			Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah		Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	X.XX.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	X.XX.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	X.XX.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	X.XX.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	X.XX.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	X.XX.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	X.XX.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	X.XX.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	X.XX.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
			Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	X.XX.01.2.01.0012 Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target	X.XX.01.2.01.0013 Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka	

			Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
			Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	X.XX.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	X.XX.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	X.XX.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	X.XX.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	X.XX.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	X.XX.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	X.XX.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	X.XX.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	X.XX.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	X.XX.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	X.XX.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	X.XX.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	X.XX.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	X.XX.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
			Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan	X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

				Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	X.XX.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	X.XX.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	X.XX.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	X.XX.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	X.XX.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	X.XX.01.2.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
				Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	X.XX.01.2.05.0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	
				Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	X.XX.01.2.05.0008 Pemindahan Tugas ASN	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	X.XX.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	X.XX.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	X.XX.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

				Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	X.XX.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	X.XX.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	X.XX.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	X.XX.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	X.XX.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	X.XX.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	X.XX.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	X.XX.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	

			Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Berbasis Elektronik pada SKPD	
			Presentase Ketatalaksanaan Tepat waktu	X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	X.XX.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	X.XX.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	X.XX.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar	
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	X.XX.01.2.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	X.XX.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	X.XX.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	X.XX.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	X.XX.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	X.XX.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	X.XX.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	X.XX.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	X.XX.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	

				Operasional atau Lapangan	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	X.XX.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	X.XX.01.2.09.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	X.XX.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	X.XX.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	X.XX.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	X.XX.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	X.XX.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	

					Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
--	--	--	--	--	--	--

4.1 URAIAN PROGRAM

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dirumuskan program sebagai berikut:

1. Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome : Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
Indikator : Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%
2. Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Outcome : Meningkatnya pemberdayaan sosial
Indikator :
 - 1 Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar Panti Rehabilitasi Sosial
 - 2 Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA
 - 3 Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar
 - 4 Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial
 - 5 Persentase Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial

3. Program : PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
Outcome : Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan
Indikator : 1 Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan
2 Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani
4. Program : PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Outcome : Meningkatnya rehabilitasi sosial
Indikator : 1 Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
2 Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
3 Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
4 Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
5 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
5. Program : PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Outcome : Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial
Indikator : 1 Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar
2 Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi

- 3 Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan
6. Program : PROGRAM PENANGANAN BENCANA
 Outcome : Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana
 Indikator : 1 Persentase korban bencana alam, sosial, dan / atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
 2 Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya
 3 Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial
7. Program : PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
 Outcome : Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan
 Indikator : Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik
8. Program : PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 Outcome : Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan
 Indikator : 1 Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)
 2 Persentase Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender
9. Program : PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
 Outcome : Menurunnya kekerasan terhadap perempuan
 Indikator : Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif

10. Program : PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
Outcome : Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak
Indikator : Persentase Layanan Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang bersifat Gender dan Hak Anak Sesuai Ketentuan
11. Program : PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
Outcome : Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak
Indikator : Tingkat kemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan
12. Program : PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
Outcome : Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif
Indikator : Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)
13. Program : PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Outcome : Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak
Indikator : 1 Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif
2 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
14. Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

- Outcome : Meningkatnya kualitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan
- Indikator : Persentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)

4.2 URAIAN KEGIATAN

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Adapun kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo yang dirumuskan untuk periode Renstra Tahun 2025-2029 adalah:

1. Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
 - Kegiatan 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Indikator : Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%
 - Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Indikator : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan
 - Kegiatan 3 : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Indikator : Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan
 - Kegiatan 4 : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Indikator : Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan
 - Kegiatan 5 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Indikator : Presentase Ketatalaksanaan Tepat waktu

- Kegiatan 6 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Indikator : Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan
- Kegiatan 7 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Indikator : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
- Kegiatan 1 : Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Indikator : Persentase pengumpulan sumbangan dalam daerah yang difasilitasi
- Kegiatan 2 : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota
- Indikator : Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota
3. Program : PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
- Kegiatan 1 : Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
- Indikator : Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi yang difasilitasi
4. Program : PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

- Kegiatan 1 : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- Indikator : Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
- Kegiatan 2 : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial
- Indikator : Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

- 5. Program : PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
 - Kegiatan 1 : Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
 - Indikator : Persentase anak terlantar diluar panti yang terfasilitasi
 - Kegiatan 2 : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Indikator : Persentase Data Fakir Miskin yang sudah diverifikasi dan validasi

- 6. Program : PROGRAM PENANGANAN BENCANA
 - Kegiatan 1 : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Indikator : Persentase Korban Bencana Alam yang mendapatkan perlindungan
 - Kegiatan 2 : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota

- Indikator : Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana
7. Program : PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
 Kegiatan 1 : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 Indikator : Persentase Sarana Prasarana TMP dalam kondisi baik
8. Program : PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 Kegiatan 1 : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 Indikator : Persentase program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas
 Kegiatan 2 : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 Indikator : Persentase Peran Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan
 Kegiatan 3 : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 Indikator : Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang difasilitasi untuk penguatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan
9. Program : PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
 Kegiatan 1 : Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota
 Indikator : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan

- Kegiatan 2 : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- Indikator : Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi
- Kegiatan 3 : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Indikator : Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kapasitas kelembagaan
10. Program : PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
- Kegiatan 1 : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Indikator : Persentase Fasilitasi Perumusan dan Penguatan Kebijakan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan
- Kegiatan 2 : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Indikator : Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang difasilitasi untuk penguatan dan pengembangan kapasitas
- Kegiatan 3 : Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Indikator : Persentase Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang difasilitasi sesuai dengan ketentuan
11. Program : PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
- Kegiatan 1 : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
- Indikator : Persentase data gender dan anak yang terkumpul
12. Program : PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
- Kegiatan 1 : Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota
- Indikator : Persentase Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha yang telah berperan serta dalam Pelembagaan PHA
- Kegiatan 2 : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota
- Indikator : Persentase kelurahan, kecamatan layak anak
13. Program : PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
- Kegiatan 1 : Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- Indikator : Persentase Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak
- Kegiatan 2 : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota

- Indikator : Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang difasilitasi
- Kegiatan 3 : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten /Kota
- Indikator : Perentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten /Kota
14. Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
- : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
- : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat

4.3 URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIAT AN/OUTPUT	Indikator outcome/o utput	Bas elin e Tah un 202 4	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KETER ANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	100 %	100 Pers en	8.903.6 75.256	100 Per sen	9.151.1 74.321	100 Per sen	9.341.9 86.259	100 Pers en	9.538. 145.18 9	100 Pers en	9.734.2 52.348	Dinas Sosial P3A
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	100 %	100 Pers en	98.612. 500	100 Per sen	98.612. 500	100 Per sen	103.612 .500	100 Pers en	109.61 2.500	100 Pers en	115.61 2.500	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 doku men	5 Doku men	21.562.5 00	5 Dok ume n	21.562.5 00	5 Dok ume n	24.562.5 00	5 Doku men	27.562. 500	5 Doku men	30.562.5 00	

	Perangkat Daerah												
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 Laporan	77.050.000	4 Laporan	77.050.000	4 Laporan	79.050.000	4 Laporan	82.050.000	4 Laporan	85.050.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100 %	100 Persen	7.581.956.681	100 Persen	7.751.955.746	100 Persen	7.848.767.684	100 Persen	7.945.926.614	100 Persen	8.048.033.773	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang	42 Orang	7.392.091.681	42 Orang	7.562.090.746	42 Orang	7.652.902.684	42 Orang	7.644.061.614	42 Orang	7.740.168.773	

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	700 Dokumen	700 Dokumen	115.115.000	700 Dokumen	115.115.000	700 Dokumen	118.115.000	700 Dokumen	221.115.000	700 Dokumen	224.115.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	4 Laporan	74.750.000	4 Laporan	74.750.000	4 Laporan	77.750.000	4 Laporan	80.750.000	4 Laporan	83.750.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100 %	100 Persen	16.056.875	100 Persen	16.056.875	100 Persen	19.056.875	100 Persen	22.056.875	100 Persen	25.056.875	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang	4 laporan	1 Laporan	16.056.875	1 Laporan	16.056.875	1 Laporan	19.056.875	1 Laporan	22.056.875	1 Laporan	25.056.875	

	Milik Daerah pada SKPD												
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administra si Kepegawai an PD Sesuai Ketentuan	100 %	100 Pers en	62.100. 000	100 Per sen	62.100. 000	100 Per sen	67.100. 000	100 Pers en	73.100 .000	100 Pers en	79.100. 000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	154 pake t	60 pake t	34.500.0 00	60 pake t	34.500.0 00	60 pake t	37.500.0 00	60 paket	40.500. 000	60 paket	43.500.0 00	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaia n	12 doku men	12 doku men	27.600.0 00	12 doku men	27.600.0 00	12 doku men	29.600.0 00	12 doku men	32.600. 000	12 doku men	35.600.0 00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administra si Umum PD Sesuai Ketentuan	100 %	100 Pers en	195.70 2.400	100 Per sen	248.20 2.400	100 Per sen	262.202 .400	100 Pers en	284.20 2.400	100 Pers en	305.20 2.400	

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 pake t	4 Pake t	32.200.000	4 Pake t	34.700.000	4 Pake t	36.700.000	4 Paket	39.700.000	4 Paket	42.700.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 pake t	4 Pake t	23.000.000	4 Pake t	23.000.000	4 Pake t	25.000.000	4 Paket	28.000.000	4 Paket	31.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 pake t	4 Pake t	5.750.000	4 Pake t	5.750.000	4 Pake t	7.750.000	4 Paket	10.750.000	4 Paket	13.750.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.760.000	12 Dokumen	2.760.000	12 Dokumen	4.760.000	12 Dokumen	7.760.000	12 Dokumen	10.760.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	6 Laporan	6.900.000	6 Laporan	6.900.000	6 Laporan	8.900.000	6 Laporan	11.900.000	6 Laporan	14.900.000	

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	83.692.400	24 Laporan	133.692.400	24 Laporan	135.692.400	24 Laporan	138.692.400	24 Laporan	141.692.400	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11 Dokumen	12 Dokumen	41.400.000	12 Dokumen	41.400.000	12 Dokumen	43.400.000	12 Dokumen	47.400.000	12 Dokumen	50.400.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketatalaksanaan Tepat waktu	100 %	100 Persen	64.183.800	100 Persen	64.183.800	100 Persen	68.183.800	100 Persen	74.183.800	100 Persen	80.183.800	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	5 Unit	29.827.550	5 Unit	29.827.550	5 Unit	31.827.550	5 Unit	34.827.550	5 Unit	37.827.550	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	5 Unit	34.356.250	5 Unit	34.356.250	5 Unit	36.356.250	5 Unit	39.356.250	5 Unit	42.356.250	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan	100 %	100 Persen	459.563.000	100 Persen	459.563.000	100 Persen	507.563.000	100 Persen	546.563.000	100 Persen	557.563.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	4 Laporan	10.667.400	4 Laporan	10.667.400	4 Laporan	12.667.400	4 Laporan	15.667.400	4 Laporan	18.667.400	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	11 laporan	11 Laporan	160.533.100	11 Laporan	160.533.100	11 Laporan	162.533.100	11 Laporan	192.533.100	11 Laporan	195.533.100	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 Laporan	29.612.500	1 Laporan	29.612.500	1 Laporan	31.612.500	1 Laporan	34.612.500	1 Laporan	37.612.500	

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 Laporan	258.750.000	12 Laporan	258.750.000	12 Laporan	300.750.000	12 Laporan	303.750.000	12 Laporan	305.750.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 Persen	425.500.000	100 Persen	450.500.000	100 Persen	465.500.000	100 Persen	482.500.000	100 Persen	523.500.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 Unit	54.050.000	1 Unit	54.050.000	1 Unit	57.050.000	1 Unit	60.050.000	1 Unit	63.050.000	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 unit	29 Unit	201.250.000	29 Unit	201.250.000	29 Unit	204.250.000	29 Unit	207.250.000	29 Unit	210.250.000	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 unit	30 Unit	17.250.000	30 Unit	17.250.000	30 Unit	20.250.000	30 Unit	25.250.000	30 Unit	28.250.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	73 Unit	56.350.000	73 Unit	56.350.000	73 Unit	59.350.000	73 Unit	62.350.000	73 Unit	66.350.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	4 unit	4 Unit	96.600.000	4 Unit	121.600.000	4 Unit	124.600.000	4 Unit	127.600.000	4 Unit	155.600.000	

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1 Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahter aan sosial yang melaksana kan pelayanan sosial di luar Panti Rehabilitas i Sosial	75 %	76	76.038. 870	77	78.152. 554	78	79.782. 119	79	81.457 .349	80	83.132. 137	
	2 Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahter aan sosial yang melaksana kan pelayanan sosial di luar Panti Rehabilitas i Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahter aan Sosial (PPKS)	75 %	76		77		78		79		80		

	lainnya di luar HIV / AIDS dan NAPZA												
	3 Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial dan / atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	80 %	81		82		83		84		85		

	4 Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	35 %	36		37		38		39		40		
	5 Persentase Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan sosial	75 %	75,5		76		76,5		77		77,5		
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengumpulan sumbangan dalam daerah yang difasilitasi		50 %	5.000.000	50 %	5.000.000	50 %	5.000.000	50%	6.000.000	50%	6.374.788	

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.374.788	ARG
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	80%	81 %	71.038.870	81 %	73.152.554	81 %	74.782.119	81%	75.457.349	81%	76.757.349	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		10 Keluarga	6.623.300	10 Keluarga	6.636.984	10 Keluarga	7.266.549	10 Keluarga	7.266.549	10 Keluarga	7.266.549	ARG

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Lembaga	14 Lembaga	7.500.000	14 Lembaga	7.600.000	14 Lembaga	7.900.000	14 Lembaga	7.900.000	14 Lembaga	7.900.000	ARG
Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/ Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial		1 Orang	7.023.300	1 Orang	7.023.300	1 Orang	7.523.300	1 Orang	7.523.300	1 Orang	7.823.300	

Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial		100 Orang	8.623.300	100 Orang	8.623.300	100 Orang	8.823.300	100 Orang	8.823.300	100 Orang	8.823.300	
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan		2 Orang	2.850.000	2 Orang	2.850.000	2 Orang	2.850.000	2 Orang	2.850.000	2 Orang	3.150.000	ARG

	Kabupaten/Kota												
Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi		2 Lembaga	6.623.300	2 Lembaga	7.623.300	2 Lembaga	7.623.300	2 Lembaga	7.623.300	2 Lembaga	7.823.300	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya		40 Orang	6.923.300	40 Orang	6.923.300	40 Orang	6.923.300	40 Orang	7.598.530	40 Orang	7.598.530	ARG

Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi		40 Orang	8.623.300	40 Orang	8.623.300	40 Orang	8.623.300	40 Orang	8.623.300	40 Orang	8.823.300	
Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti		12 Laporan	6.623.300	12 Laporan	7.623.300	12 Laporan	7.623.300	12 Laporan	7.623.300	12 Laporan	7.623.300	
Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis		40 Orang	9.625.770	40 Orang	9.625.770	40 Orang	9.625.770	40 Orang	9.625.770	40 Orang	9.925.770	

PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1 Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatk an Pelayanan Pemulanga n	1	1	26.250. 000	1	27.562. 500	1	28.940. 625	1	30.387 .656	1	32.507. 039	
	2 Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	1	100		100		100		100		100		

Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi yang difasilitasi	%	100 %	26.250.000	100 %	27.562.500	100 %	28.940.625	100 %	30.387.656	100 %	32.507.039	
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke		2 Oran g	26.250.000	2 Oran g	27.562.500	2 Oran g	28.940.625	2 Oran g	30.387.656	2 Oran g	32.507.039	ARG

	Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota												
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1 Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80	80,5	1.428.848.841	81	1.468.567.131	81,5	1.499.188.353	82	1.530.667.653	82,5	1.562.138.644	
	2 Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80	80,5		81		81,5		82		82,5		
	3 Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80	81		82		83		84		85		

	4 Persentase Gelandang dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	70	70,5		71		71, 5		72		72,5		
	5 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahter aan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV / AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	85	85,5		86		86, 5		87		87,5		

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		80 Persen	1.121.854.841	80 Persen	1.161.573.131	80 Persen	1.191.519.353	80 Persen	1.196.222.353	80 Persen	1.213.693.344	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	800.000.000	100 Orang	810.000.000	100 Orang	811.000.000	100 Orang	811.000.000	100 Orang	811.400.991	ARG

Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	15.000.000	100 Orang	18.000.000	100 Orang	21.000.000	100 Orang	23.450.000	100 Orang	24.450.000	ARG
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	55.000.000	20 Orang	57.000.000	20 Orang	59.000.000	20 Orang	59.358.000	20 Orang	60.358.000	ARG
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	20.000.000	20 Orang	22.000.000	20 Orang	26.000.000	20 Orang	26.000.000	20 Orang	27.000.000	ARG

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	65.000.000	100 Orang	67.000.000	100 Orang	69.000.000	100 Orang	69.000.000	100 Orang	70.000.000	ARG
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	65.000.000	100 Orang	67.000.000	100 Orang	69.164.512	100 Orang	69.164.512	100 Orang	70.164.512	ARG

Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	50.000.000	50 Orang	55.000.000	50 Orang	58.000.000	50 Orang	58.000.000	50 Orang	58.000.000	ARG
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	4.354.841	20 Orang	5.354.841	20 Orang	7.354.841	20 Orang	7.354.841	20 Orang	8.354.841	ARG
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	2.000.000	10 Orang	3.000.000	10 Orang	4.000.000	10 Orang	2.645.000	10 Orang	5.645.000	ARG

Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	20.000.000	20 Orang	25.000.000	20 Orang	30.000.000	20 Orang	30.000.000	20 Orang	32.000.000	ARG
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	5.000.000	20 Orang	6.000.000	20 Orang	6.900.000	20 Orang	6.900.000	20 Orang	7.935.000	ARG
Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan	-	10 Orang	2.000.000	10 Orang	2.218.290	10 Orang	2.300.000	10 Orang	2.645.000	10 Orang	3.645.000	ARG

	Kabupaten/Kota												
Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	-	29 Orang	4.500.000	29 Orang	6.000.000	29 Orang	6.900.000	29 Orang	6.900.000	29 Orang	7.935.000	
Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	5 Orang	5.000.000	5 Orang	6.000.000	5 Orang	6.900.000	5 Orang	7.935.000	5 Orang	8.935.000	

Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	-	50 Orang	4.000.000	50 Orang	6.000.000	50 Orang	7.000.000	50 Orang	7.935.000	50 Orang	8.935.000	
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	-	5 Orang	5.000.000	5 Orang	6.000.000	5 Orang	7.000.000	5 Orang	7.935.000	5 Orang	8.935.000	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar	80 %	80 %	306.994.000	80 %	306.994.000	80 %	307.669.000	80%	334.445.300	80%	348.445.300	

	Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya												
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	75 Orang	1.500.000	75 Orang	1.500.000	75 Orang	1.725.000	75 Orang	4.983.800	75 Orang	5.983.800	ARG
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	50 Orang	3.000.000	50 Orang	3.000.000	50 Orang	3.450.000	50 Orang	5.967.500	50 Orang	6.967.500	ARG
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	75 Orang	300 Orang	54.900.000	300 Orang	54.900.000	300 Orang	54.900.000	300 Orang	54.900.000	300 Orang	54.900.000	ARG

	Kewenangan Kabupaten/K ota												
Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/K ota	50 Oran g	100 Oran g	120.000. 000	100 Oran g	120.000. 000	100 Oran g	120.000. 000	100 Oran g	120.000 .000	100 Oran g	120.000. 000	ARG
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatka n Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/K ota	300 Oran g	17 Oran g	70.000.0 00	17 Oran g	70.000.0 00	17 Oran g	70.000.0 00	17 Oran g	70.000. 000	17 Oran g	70.000.0 00	ARG

Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	75 Orang	2.250.000	75 Orang	2.250.000	75 Orang	2.250.000	75 Orang	5.250.000	75 Orang	8.250.000	ARG
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	75 Orang	8.250.000	75 Orang	8.250.000	75 Orang	8.250.000	75 Orang	10.250.000	75 Orang	8.250.000	ARG
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	17 Orang	50 Orang	12.500.000	50 Orang	12.500.000	50 Orang	12.500.000	50 Orang	12.500.000	50 Orang	12.500.000	ARG

	Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota												
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	-	75 Orang	6.500.000	75 Orang	6.500.000	75 Orang	6.500.000	75 Orang	9.500.000	75 Orang	9.500.000	ARG

Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang	5.250.000	75 Orang	5.250.000	75 Orang	5.250.000	75 Orang	9.250.000	75 Orang	9.250.000	ARG
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	25 Orang	4.000.000	25 Orang	4.000.000	25 Orang	4.000.000	25 Orang	5.000.000	25 Orang	7.000.000	ARG
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	20 Orang	4.000.000	20 Orang	4.000.000	20 Orang	4.000.000	20 Orang	5.000.000	20 Orang	7.000.000	ARG

Pemberian Pelayanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan rujukan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	20 Orang	5.000.000	20 Orang	5.000.000	20 Orang	5.000.000	20 Orang	6.000.000	20 Orang	7.000.000	ARG
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2.461.000	2 Dokumen	2.461.000	2 Dokumen	2.461.000	2 Dokumen	5.461.000	2 Dokumen	6.461.000	ARG
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan	-	5 Orang	2.461.000	5 Orang	2.461.000	5 Orang	2.461.000	5 Orang	5.461.000	5 Orang	6.461.000	

	Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota												
Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	-	50 Orang	2.461.000	50 Orang	2.461.000	50 Orang	2.461.000	50 Orang	2.461.000	50 Orang	4.461.000	
Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan	-	29 Orang	2.461.000	29 Orang	2.461.000	29 Orang	2.461.000	29 Orang	2.461.000	29 Orang	4.461.000	

	Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi												
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1 Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	80	81	9.302.3 47.431	82	9.560.3 45.733	83	9.758.8 85.921	84	9.962. 959.38 0	85	10.166. 306.24 4	
	2 Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandiria n ekonomi	7,5	7,6		7,7		7,8		7,9		8		
	3Persentas e keluarga miskin dan rentan penerima perlindung an sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	3	3,2		3,4		3,6		3,8		4,0		

Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak terlantar diluar panti yang terfasilitasi	-	50 %	80.000.000	50 %	120.000.000	50 %	160.000.000	50%	200.000.000	50%	240.000.000	
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	-	10 Orang	20.000.000	10 Orang	30.000.000	10 Orang	40.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	60.000.000	ARG
Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	10 Orang	20.000.000	10 Orang	30.000.000	10 Orang	40.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	60.000.000	ARG
Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	-	10 Orang	20.000.000	10 Orang	30.000.000	10 Orang	40.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	60.000.000	ARG

Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	-	5 Oran g	20.000.000	5 Oran g	30.000.000	5 Oran g	40.000.000	5 Oran g	50.000.000	5 Oran g	60.000.000	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang sudah diverifikasi dan validasi	50 %	50 %	9.222.347.431	50 %	9.440.345.733	50 %	9.598.885.921	50%	9.762.959.380	50%	9.926.306.244	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota yang di data	800 oran g	800 oran g	925.000.000	800 oran g	975.000.000	800 oran g	1.020.000.000	800 oran g	1.030.000.000	800 oran g	1.040.000.000	ARG
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	100 Oran g	555.000.000	100 Oran g	600.000.000	100 Oran g	650.000.000	100 Oran g	700.000.000	100 Oran g	800.000.000	ARG

Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	500 Orang	7.682.347.431	500 Orang	7.775.345.733	500 Orang	7.808.885.921	500 Orang	7.882.959.380	500 Orang	7.936.306.244	ARG
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	-	800 orang	20.000.000	800 orang	30.000.000	800 orang	40.000.000	800 orang	50.000.000	800 orang	50.000.000	ARG
Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan	-	50 Orang	20.000.000	50 Orang	30.000.000	50 Orang	40.000.000	50 Orang	50.000.000	50 Orang	50.000.000	

	Kabupaten/Kota												
Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	-	10 Orang	20.000.000	10 Orang	30.000.000	10 Orang	40.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1 Persentase korban bencana alam, sosial, dan / atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap	100	100	387.105.746	100	397.866.282	100	406.162.226	100	414.690.643	100	423.216.808	

	darurat bencana												
	2 Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	80	81		82		83		84		85		
	3 Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	100	100		100		100		100		100		
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam yang mendapatkan perlindungan	80 %	80 %	192.500.000	80 %	200.500.000	80 %	205.500.000	80%	210.500.000	80%	215.500.000	

Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang	60.000.000	500 Orang	61.000.000	500 Orang	62.000.000	500 Orang	63.000.000	500 Orang	64.000.000	ARG
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	250 Orang	12.500.000	250 Orang	13.500.000	250 Orang	14.500.000	250 Orang	15.500.000	250 Orang	16.500.000	ARG

Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	10.000.000	100 Orang	12.000.000	100 Orang	13.000.000	100 Orang	14.000.000	100 Orang	15.000.000	ARG
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100.000.000	100 Orang	102.000.000	100 Orang	103.000.000	100 Orang	104.000.000	100 Orang	105.000.000	ARG
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	-	50 Orang	10.000.000	50 Orang	12.000.000	50 Orang	13.000.000	50 Orang	14.000.000	50 Orang	15.000.000	ARG

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan fasilitas Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	80 %	80 %	194.605.746	80 %	197.366.282	80 %	200.662.226	80%	204.190.643	80%	207.716.808	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1 Kampung	2.500.000	1 Kampung	3.000.000	1 Kampung	3.500.000	1 Kampung	4.000.000	1 Kampung	4.526.165	ARG

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	225 orang	34 Orang	170.000.000	34 Orang	172.000.000	34 Orang	173.000.000	34 Orang	174.000.000	34 Orang	175.000.000	ARG
Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	5 Orang	2.500.000	5 Orang	2.500.000	5 Orang	2.750.000	5 Orang	3.000.000	5 Orang	4.000.000	
Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	-	5 Orang	2.500.000	5 Orang	2.500.000	5 Orang	2.750.000	5 Orang	3.000.000	5 Orang	4.000.000	

Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	-	1 Kelurahan	2.105.746	1 Kelurahan	2.366.282	1 Kelurahan	2.500.000	1 Kelurahan	3.000.000	1 Kelurahan	3.000.000	
Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	-	34 Orang	2.500.000	34 Orang	2.500.000	34 Orang	2.750.000	34 Orang	3.000.000	34 Orang	3.000.000	
Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	-	5 Orang	2.500.000	5 Orang	2.500.000	5 Orang	2.750.000	5 Orang	3.000.000	5 Orang	3.000.000	
Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	-	50 Orang	2.500.000	50 Orang	2.500.000	50 Orang	2.712.226	50 Orang	2.990.643	50 Orang	2.990.643	

Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	-	1 Doku men	2.500.00 0	1 Dok ume n	2.500.00 0	1 Dok ume n	2.650.00 0	1 Doku men	2.900.0 00	1 Doku men	2.900.00 0	
Fasilitasi Pemetaan Rawan Konflik Sosial	Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	-	1 Doku men	2.500.00 0	1 Dok ume n	2.500.00 0	1 Dok ume n	2.650.00 0	1 Doku men	2.650.0 00	1 Doku men	2.650.00 0	
Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulan gan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	-	5 Oran g	2.500.00 0	5 Oran g	2.500.00 0	5 Oran g	2.650.00 0	5 Oran g	2.650.0 00	5 Oran g	2.650.00 0	

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik	85	85,2	161.145.220	85,4	165.624.639	85,6	169.078.093	85,8	172.628.321	86	176.177.611	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Prasarana TMP dalam kondisi baik	90%	90%	161.145.220	90%	165.624.639	90%	169.078.093	90%	172.628.321	90%	176.177.611	
Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	16.745.220	1 Dokumen	17.724.639	1 Dokumen	18.678.093	1 Dokumen	19.678.093	1 Dokumen	20.927.611	ARG
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman	70 makam	1 Makam	40.000.000	1 Makam	41.000.000	1 Makam	42.000.000	1 Makam	43.050.228	1 Makam	44.000.000	ARG

	Makam Pahlawan Kabupaten/Kota												
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	36 laporan	24 Laporan	99.400.000	24 Laporan	100.400.000	24 Laporan	101.400.000	24 Laporan	102.400.000	24 Laporan	103.000.000	ARG
Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	5 Orang	2.500.000	5 Orang	3.250.000	5 Orang	3.500.000	5 Orang	4.000.000	5 Orang	4.500.000	
Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	5 Orang	2.500.000	5 Orang	3.250.000	5 Orang	3.500.000	5 Orang	3.500.000	5 Orang	3.750.000	

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase fasilitasi pemberday aan Lembaga Kemasyara katan Kelurahan (LKK)	90	100	1.606.7 47.743	100	1.651.4 11.161	100	1.685.8 44.880	100	1.721. 243.51 1	100	1.756.6 32.800	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyara kat Kelurahan yang Berpartisip asi Dalam Upaya Pemberday aan Masyaraka t	90	90 %	1.606.7 47.743	90 %	1.651.4 11.161	90 %	1.685.8 44.880	90%	1.721. 243.51 1	90%	1.756.6 32.800	
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi		1 Doku men	50.000.0 00	1 Dok ume n	55.000.0 00	1 Dok ume n	60.000.0 00	1 Doku men	63.398. 631	1 Doku men	73.398.6 31	

	Masyarakat Hukum Adat												
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	58.000.000	1 Dokumen	69.000.000	

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4	4 Lemb baga	700.497. 743	4 Lemb baga	705.161. 161	4 Lemb baga	705.161. 161	4 Lemb baga	708.161. .161	4 Lemb baga	708.161. 161	
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat		1 Unit	200.000. 000	1 Unit	204.000. 000	1 Unit	204.000. 000	1 Unit	204.000. .000	1 Unit	214.000. 000	

	Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat												
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		1 Dokumen	26.250.000	1 Dokumen	30.250.000	1 Dokumen	35.250.000	1 Dokumen	35.250.000	1 Dokumen	35.250.000	
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	29.433.719	1 Laporan	32.433.719	1 Laporan	32.433.719	
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong	1	1 Laporan	90.000.000	1 Laporan	92.000.000	1 Laporan	92.000.000	1 Laporan	95.000.000	1 Laporan	95.000.000	

	Royong Masyarakat												
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa		1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	38.000.000	
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	1 Dokumen	410.000.000	1 Dokumen	410.000.000	1 Dokumen	415.000.000	1 Dokumen	420.000.000	1 Dokumen	420.000.000	

Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		10 Keluarga	20.000.000	10 Keluarga	25.000.000	10 Keluarga	30.000.000	10 Keluarga	35.000.000	10 Keluarga	36.389.289	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		10 Keluarga	20.000.000	10 Keluarga	25.000.000	10 Keluarga	30.000.000	10 Keluarga	35.000.000	10 Keluarga	35.000.000	

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1 Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	30	32	367.10 0.528	33	377.30 4.970	34	385.17 2.189	35	393.2 59.86 5	36	401.34 5.408	
	2 Persentase Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusut amaan Gender	53	55		58		60		65		66		
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	55 %	55 %	146.85 0.528	55 %	152.10 0.528	55 %	155.96 7.747	55%	160.2 17.74 7	55%	164.71 7.747	

Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	12.500.528	1 Dokumen	13.000.528	1 Dokumen	13.867.747	1 Dokumen	14.867.747	1 Dokumen	15.867.747	ARG
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	-	2 Laporan	63.000.000	2 Laporan	63.500.000	2 Laporan	64.000.000	2 Laporan	64.500.000	2 Laporan	64.500.000	
Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	-	1 Kebijakan	10.750.000	1 Kebijakan	11.750.000	1 Kebijakan	12.250.000	1 Kebijakan	12.750.000	1 Kebijakan	13.750.000	ARG
Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan	-	1 Lembaga	28.250.000	1 Lembaga	29.000.000	1 Lembaga	29.500.000	1 Lembaga	30.000.000	1 Lembaga	31.000.000	

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	-	1 Laporan	11.000.000	1 Laporan	11.500.000	1 Laporan	12.000.000	1 Laporan	12.500.000	1 Laporan	13.000.000	
Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-	1 Lembar	10.600.000	1 Lembar	11.600.000	1 Lembar	12.600.000	1 Lembar	13.600.000	1 Lembar	14.600.000	
Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	-	5 Orang	10.750.000	5 Orang	11.750.000	5 Orang	11.750.000	5 Orang	12.000.000	5 Orang	12.000.000	

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten/Kota	Persentase Peran Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, ekonomi dan Organisasi Kemasya rakan		6%	168.25 0.000	6%	173.20 4.442	6%	177.20 4.442	6%	180.0 42.11 8	6%	182.04 2.118	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakan/ profesi/dunia usaha/media yang diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	-	23 Lem bag a	63.250. 000	23 Lem bag a	64.204. 442	23 Lem bag a	65.204. 442	23 Lem baga	66.042 .118	23 Lem baga	66.042. 118	ARG

Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi	-	1 Lem bag a	11.750. 000	1 Lem bag a	12.500. 000	1 Lem bag a	13.500. 000	1 Lem baga	13.500 .000	1 Lem baga	13.500. 000	ARG
Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	-	1 Lem bag a	11.000. 000	1 Lem bag a	11.500. 000	1 Lem bag a	12.500. 000	1 Lem baga	12.500 .000	1 Lem baga	12.500. 000	
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	-	1 Lap oran	10.750. 000	1 Lap ora n	11.500. 000	1 Lap ora n	12.500. 000	1 Lapo ran	12.500 .000	1 Lapo ran	13.500. 000	

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	-	150 Orang	60.000.000	150 Orang	61.000.000	150 Orang	61.000.000	150 Orang	62.000.000	150 Orang	62.000.000	
Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	-	5 Orang	11.500.000	5 Orang	12.500.000	5 Orang	12.500.000	5 Orang	13.500.000	5 Orang	14.500.000	

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang difasilitasi untuk penguatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan		50 %	52.000 .000	50 %	52.000 .000	50 %	52.000. 000	50 %	53.00 0.000	50 %	54.585 .543	
pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	-	1 Lem bag a	10.750. 000	1 Lem bag a	10.750. 000	1 Lem bag a	10.750. 000	1 Lem bag a	11.750 .000	1 Lem bag a	12.750. 000	

penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	-	1 Dokumen	11.250.000	1 Dokumen	11.250.000	1 Dokumen	11.250.000	1 Dokumen	11.250.000	1 Dokumen	11.250.000	
monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	-	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.585.543	
Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	-	1 Orang	10.000.000	1 Orang	10.000.000	1 Orang	10.000.000	1 Orang	10.000.000	1 Orang	10.000.000	

mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat kabupaten/kota.	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-	1 Lem baga	10.000. 000	1 Lem baga	10.000. 000	1 Lem baga	10.000. 000	1 Lem baga	10.000. 000	1 Lem baga	10.000. 000	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100	100	429.17 4.322	100	441.10 4.254	100	448.30 1.758	100	459.7 56.99 6	100	469.20 9.740	

Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan	100 %	100 %	77.000 .000	100 %	79.000 .000	100 %	81.000. 000	100 %	85.00 0.000	100 %	86.452 .744	
monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1 Laporan	15.000. 000	1 Laporan	15.500. 000	1 Laporan	16.000. 000	1 Laporan	17.000 .000	1 Laporan	18.000. 000	
Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	15.000. 000	1 Dokumen	15.500. 000	1 Dokumen	16.000. 000	1 Dokumen	17.000 .000	1 Dokumen	17.452. 744	

Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	-	1 Dokumen	22.000.000	1 Dokumen	22.500.000	1 Dokumen	23.000.000	1 Dokumen	24.000.000	1 Dokumen	24.000.000	
Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	-	1 Lembar	25.000.000	1 Lembar	25.500.000	1 Lembar	26.000.000	1 Lembar	27.000.000	1 Lembar	27.000.000	

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	100 %	100 %	232.400.000	100 %	238.400.000	100 %	240.400.000	100 %	246.400.000	100 %	253.400.000	
layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota	-	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.500.000	2 Orang	11.000.000	2 Orang	12.000.000	2 Orang	13.000.000	
layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	-	24 Orang	38.400.000	24 Orang	39.400.000	24 Orang	40.400.000	24 Orang	41.400.000	24 Orang	42.400.000	

layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	-	16 Orang	48.000.000	16 Orang	48.500.000	16 Orang	49.000.000	16 Orang	50.000.000	16 Orang	51.000.000	
layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	-	10 Orang	30.000.000	10 Orang	31.000.000	10 Orang	31.000.000	10 Orang	32.000.000	10 Orang	33.000.000	

layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	-	4 Orang	10.000.000	4 Orang	11.000.000	4 Orang	11.000.000	4 Orang	11.000.000	4 Orang	12.000.000	
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-	24 Orang	60.000.000	24 Orang	61.000.000	24 Orang	61.000.000	24 Orang	62.000.000	24 Orang	63.000.000	
Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban	-	24 Orang	36.000.000	24 Orang	37.000.000	24 Orang	37.000.000	24 Orang	38.000.000	24 Orang	39.000.000	

	Tingkat Kabupaten/Kota												
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kapasitas kelembagaan	100 %	100 %	119.774.322	100 %	123.704.254	100 %	126.901.758	100 %	128.356.996	100 %	129.356.996	
Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-	2 Lembaga	10.000.000	2 Lembaga	11.000.000	2 Lembaga	12.000.000	2 Lembaga	12.455.238	2 Lembaga	13.455.238	ARG

Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan provinsi	-	1 Laporan	8.500.000	1 Laporan	9.500.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	
pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	-	2 Orang	10.000.000	2 Orang	11.000.000	2 Orang	12.000.000	2 Orang	13.000.000	2 Orang	13.000.000	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	-	41 Orang	82.000.000	41 Orang	82.000.000	41 Orang	82.697.000	41 Orang	81.697.000	41 Orang	81.697.000	

Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	-	1 Dok ume n	9.274.322	1 Dok ume n	10.204.254	1 Dok ume n	10.204.758	1 Dok ume n	11.204.758	1 Dok ume n	11.204.758	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Layanan Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang beperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Ketentuan	100	100	367.500.000	100	385.875.000	100	399.486.686	100	425.427.187	100	446.698.546	

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Perumusan dan Penguatan Kebijakan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	-	40 %	97.500 .000	40 %	104.87 5.000	40 %	108.48 6.686	40 %	116.9 27.18 7	40%	125.19 8.546	
Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	-	2 Lem bag a	20.000. 000	2 Lem bag a	21.000. 000	2 Lem bag a	22.486. 686	2 Lem bag a	24.427 .187	2 Lem bag a	26.698. 546	

Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1 Kebijakan	17.500.000	1 Kebijakan	19.500.000	1 Kebijakan	20.500.000	1 Kebijakan	23.000.000	1 Kebijakan	25.000.000	
Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	25 Orang	45.000.000	25 Orang	47.000.000	25 Orang	47.500.000	25 Orang	49.500.000	25 Orang	51.500.000	

monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	-	1 Dok ume n	15.000. 000	1 Dok ume n	17.375. 000		18.000. 000		20.000 .000		22.000. 000	
---	---	---	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang difasilitasi untuk penguatan dan pengembangan kapasitas		40 %	168.000.000	40 %	174.000.000	40 %	179.000.000	40 %	188.000.000	40 %	194.500.000	
monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	17.000.000	1 Dokumen	18.000.000	1 Dokumen	21.000.000	1 Dokumen	22.500.000	

pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatka n pendamping an	-	5 Lem bag a	42.500. 000	5 Lem bag a	43.500. 000	5 Lem bag a	44.500. 000	5 Lem baga	46.000 .000	5 Lem baga	47.000. 000	
penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/K ota	-	5 Lem bag a	42.500. 000	5 Lem bag a	43.500. 000	5 Lem bag a	44.500. 000	5 Lem baga	46.000 .000	5 Lem baga	47.000. 000	
peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatka n peningkatan kapasitas	-	4 Lem bag a	34.000. 000	4 Lem bag a	35.000. 000	4 Lem bag a	36.000. 000	4 Lem baga	37.500 .000	4 Lem baga	39.000. 000	

Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	-	4 Lem bag a	34.000. 000	4 Lem bag a	35.000. 000	4 Lem bag a	36.000. 000	4 Lem baga	37.500 .000	4 Lem baga	39.000. 000	
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang difasilitasi sesuai dengan ketentuan	-	40 %	102.00 0.000	40 %	107.00 0.000	40 %	112.00 0.000	40 %	120.5 00.00 0	40 %	127.00 0.000	

layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	-	10 Orang	17.500.000	10 Orang	18.500.000	10 Orang	19.500.000	10 Orang	21.500.000	10 Orang	24.000.000	
layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota	-	10 Orang	21.000.000	10 Orang	22.000.000	10 Orang	23.000.000	10 Orang	25.000.000	10 Orang	26.000.000	
layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	-	10 Orang	25.000.000	10 Orang	26.000.000	10 Orang	27.000.000	10 Orang	29.000.000	10 Orang	30.000.000	

Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota	-	10 Orang	15.000.000	10 Orang	16.000.000	10 Orang	17.000.000	10 Orang	18.000.000	10 Orang	19.000.000	
Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	-	10 Orang	23.500.000	10 Orang	24.500.000	10 Orang	25.500.000	10 Orang	27.000.000	10 Orang	28.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	40	41	6.888.850	43	7.080.342	44	7.227.974	45	7.379.746	46	7.531.474	

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase data gender dan anak yang terkumpul	30 %	30 %	6.888.850	30 %	7.080.342	30 %	7.227.974	30%	7.379.746	30%	7.531.474	
Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	1 Dokumen	2.888.850	1 Dokumen	2.888.850	1 Dokumen	2.888.850	1 Dokumen	3.040.622	1 Dokumen	3.040.622	ARG
Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak	-	1 Lembaga	2.000.000	1 Lembaga	2.191.492	1 Lembaga	2.191.492	1 Lembaga	2.191.492	1 Lembaga	2.343.220	

Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	-	1 Dok ume n	2.000.000	1 Dok ume n	2.000.000	1 Dok ume n	2.147.632	1 Dok ume n	2.147.632	1 Dok ume n	2.147.632	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tingkat kemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	70,2	71,3	321.885.958	72,4	322.674.098	73,5	328.836.432	74,6	313.083.952	75	306.996.606	

Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota	Persentase Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha yang telah berperan serta dalam Pelembagaan PHA	70 %	70 %	25.000 .000	70 %	25.788 .140	70 %	28.950. 474	70%	22.50 0.000	70%	21.500 .000	
Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan	-	10 Lem bag a	10.000. 000	10 Lem bag a	10.000. 000	10 Lem bag a	11.162. 334	10 Lem bag a	8.500. 000	10 Lem bag a	7.500.0 00	

	Kabupaten/Kota												
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	10	5.000.000	10	5.500.000	10	6.500.000	10	5.000.000	10	5.000.000	

Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	2 Orang	2.500.000	2 Orang	2.788.140	2 Orang	3.788.140	2 Orang	2.500.000	2 Orang	2.500.000	
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan	-	1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	6.500.000	1 Laporan	6.500.000	

	Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota												
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase kelurahan, kecamatan layak anak	85 %	85 %	296.88 5.958	85 %	296.88 5.958	85 %	299.88 5.958	85%	290.5 83.95 2	85%	285.49 6.606	
Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	-	5 Orang	2.500.000	5 Orang	2.500.000	5 Orang	4.500.000	5 Orang	2.500.000	5 Orang	2.500.000	

penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	22.500.000	1 Dokumen	22.500.000	1 Dokumen	22.500.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	19.000.000	
Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-	10 Lembaga	251.385.958	10 Lembaga	251.385.958	10 Lembaga	251.385.958	10 Lembaga	248.583.952	10 Lembaga	244.496.606	

monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1 Lap oran	2.500.0 00	1 Lap ora n	2.500.0 00	1 Lap ora n	3.500.0 00	1 Lapo ran	2.500. 000	1 Lapo ran	2.500.0 00	
pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatka n pendamping an	-	4 Lem bag a	18.000. 000	4 Lem bag a	18.000. 000	4 Lem bag a	18.000. 000	4 Lem baga	17.000 .000	4 Lem baga	17.000. 000	

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1 Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100	100	337.03 2.577	100	346.40 1.210	100	350.624 .051	100	361.04 9.294	100	368.47 2.577	
	2 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	83,9 7	84,4 7		84, 97		85, 47		85,9 7		86,4 7		
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	70 %	70 %	96.500 .000	70 %	102.50 0.000	70 %	102.50 0.000	70%	104.9 25.24 3	70%	108.34 8.526	
koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan	-	1 Dok ume n	6.000.0 00	1 Dok ume n	7.000.0 00	1 Dok ume n	7.000.0 00	1 Dok ume n	7.500. 000	1 Dok ume n	8.500.0 00	

	terhadap anak kewenangan kabupaten/k ota												
Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatka n Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/K ota	-	1 Kegi atan	55.000. 000	1 Kegi atan	56.000. 000	1 Kegi atan	56.000. 000	1 Kegi atan	56.000 .000	1 Kegi atan	56.423. 283	
monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	-	1 Lap oran	5.000.0 00	1 Lap ora n	6.000.0 00	1 Lap ora n	6.000.0 00	1 Lapo ran	7.000. 000	1 Lapo ran	8.000.0 00	

Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	-	1 Dok ume n	5.250.0 00	1 Dok ume n	6.250.0 00	1 Dok ume n	6.250.0 00	1 Dok ume n	7.175. 243	1 Dok ume n	7.175.2 43	
Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	-	5 Ora ng	20.000. 000	5 Ora ng	21.000. 000	5 Ora ng	21.000. 000	5 Oran g	21.000 .000	5 Oran g	21.000. 000	
Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota	-	1 Kebi jaka n	5.250.0 00	1 Kebi jaka n	6.250.0 00	1 Kebi jaka n	6.250.0 00	1 Kebij akan	6.250. 000	1 Kebij akan	7.250.0 00	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang difasilitasi	100 Pers en	100 Pers en	185.53 2.577	100 Per sen	188.53 2.577	100 Per sen	188.53 2.577	100 Pers en	188.5 32.57 7	100 Pers en	191.53 2.577	

Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-	24 Orang	51.932.577	24 Orang	51.932.577	24 Orang	51.932.577	24 Orang	51.932.577	24 Orang	51.932.577	
layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	-	16 Orang	43.200.000	16 Orang	43.200.000	16 Orang	43.200.000	16 Orang	43.200.000	16 Orang	43.200.000	
layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	-	10 Orang	20.000.000	10 Orang	20.000.000	10 Orang	20.000.000	10 Orang	20.000.000	10 Orang	20.000.000	

layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	-	24 Orang	12.000.000	24 Orang	13.000.000	24 Orang	13.000.000	24 Orang	13.000.000	24 Orang	13.000.000	
layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	-	10 Orang	20.000.000	10 Orang	20.000.000	10 Orang	20.000.000	10 Orang	20.000.000	10 Orang	21.000.000	
Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendamping	-	24 Orang	14.400.000	24 Orang	15.400.000	24 Orang	15.400.000	24 Orang	15.400.000	24 Orang	15.400.000	

	an korban Tingkat Kabupaten/K ota												
layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	4 Orang	4.000.000	4 Orang	5.000.000	4 Orang	5.000.000	4 Orang	5.000.000	4 Orang	6.000.000	
layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-	24 Orang	20.000.000	24 Orang	20.000.000	24 Orang	20.000.000	24 Orang	20.000.000	24 Orang	21.000.000	

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Perentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	70 Persen	70 Persen	55.000.000,00	70 Persen	55.368.633,00	70 Persen	59.591.474,00	70 Persen	67.591.474,00	70 Persen	68.591.474,00	
Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	-	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.868.633	1 Dokumen	2.868.633	1 Dokumen	4.868.633	1 Dokumen	5.868.633	ARG

koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	-	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	
monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat	-	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	3.500.000	1 Laporan	4.500.000	1 Laporan	4.500.000	

	Daerah Kabupaten/K ota												
Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/K ota tingkat Kabupaten/K ota yang mendapatka n advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-	1 Lem bag a	2.500.0 00	1 Lem bag a	2.500.0 00	1 Lem bag a	3.222.8 41	1 Lem baga	4.222. 841	1 Lem baga	4.222.8 41	

penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	1 Dok ume n	2.500.0 00	1 Dok ume n	2.500.0 00	1 Dok ume n	3.500.0 00	1 Dok ume n	4.500. 000	1 Dok ume n	4.500.0 00	
Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatka n bimtek	-	20 Ora ng	40.000. 000	20 Ora ng	40.000. 000	20 Ora ng	40.000. 000	20 Oran g	41.000 .000	20 Oran g	41.000. 000	

pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	-	1 Lem bag a	2.500.000	1 Lem bag a	2.500.000	1 Lem bag a	3.500.000	1 Lem baga	4.500.000	1 Lem baga	4.500.000	
--	---	---	----------------------	-----------	----------------------	-----------	----------------------	-----------	------------------	-----------	------------------	-----------	--

4.4 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dari sejumlah sub kegiatan pada kegiatan yang diampu pada ketiga urusan: Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat, terdapat sub kegiatan yang menjadi prioritas, yaitu:

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			Penyediaan Permakanan	
			Penyediaan Sandang	
			Penyediaan Alat Bantu	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	

			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
			Pemberian Layanan Kedaruratan	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			Pemberian Layanan Rujukan	
			Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan	
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
			Pemberian Layanan Kedaruratan	
			Penyediaan Permakanan	
			Penyediaan Sandang	
			Penyediaan Alat Bantu	
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
			Pemberian Pelayanan Rujukan	
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
			Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	
			Rujukan Anak-Anak Terlantar	
			Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	

			Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	
			Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	
	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
	6	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
				Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota

7			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota	
			monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

			Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
8	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota	
			Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	
			Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
9	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	
			Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota	
			Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

			layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	
			Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	
			Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025 – 2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) serta mengevaluasi kinerja penyelenggaraan urusan, Perangkat Daerah menetapkan target-target yang terukur melalui penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD dilakukan secara spesifik melalui IKU. Indikator-indikator yang disajikan merupakan hasil seleksi yang cermat, dirancang untuk secara langsung merefleksikan kemajuan dan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Dengan demikian, IKU menjadi tolok ukur utama dalam menilai efektivitas Renstra PD. Berikut adalah target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah:

Tabel 4.5
Tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo

Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Persentase Penurunan PMKS/PPKS	%	8,792	9,193%	9,596%	10,001%	10,467%	10,875%	11,284%	
Indeks Pembangunan Gender	indeks	97,26	97,5	97,78	97,95	98,15	98,38	98,5	
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	90,05	90,25	90,30	90,35	90,40	90,45	90,50	
Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,39	0,248	0,239	0,23	0,222	0,214	0,207	
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	69,7	70,90	72,10	73,30	74,50	75,70	76,90	
Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nilai	A	A	A	A	A	A	A	

4.6 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025 – 2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI

Penentuan target penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 – 2029 dilakukan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK fokus pada aspek-aspek kunci dari pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Penetapan target IKK bertujuan untuk memastikan bahwa setiap urusan dilaksanakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan standar yang diharapkan.

Di bawah ini adalah Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029:

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	URUSAN SOSIAL									
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	90,05	90,25	90,30	90,35	90,40	90,45	90,50	
	URUSAN PPPA									
2	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,39	0,248	0,239	0,23	0,222	0,214	0,207	
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	69,07	70,9	72,1	73,3	74,5	75,7	76,9	
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Kelompok Masyarakat yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	

Tabel 4.5 menyajikan indikator kinerja kunci Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo yang terbagi dalam tiga urusan, yaitu Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada urusan Sosial, terdapat satu indikator utama yaitu Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Menunjukkan tren kenaikan yang konsisten mulai tahun 2025 – 2030.

Untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, indikator yang digunakan ada dua yaitu, Indeks Ketimpangan Gender dan Indeks Perlindungan Anak (IPA). Indeks Ketimpangan Gender targetnya mengalami penurunan setiap tahun sedangkan Indeks Perlindungan Anak (IPA) targetnya

konsisten naik. Sedangkan pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan Persentase Kelompok Masyarakat yang aktif targetnya tetap setiap tahun, yaitu terfasilitasi 100%.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo 2025-2029 merupakan dokumen berkesinambungan dari rencana strategis pembangunan bidang kesejahteraan sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat (2025-2029) dan sekaligus merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo tahun 2025-2029. Pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam kurun waktu sebelumnya telah banyak hasil yang dicapai khususnya dalam meningkatkan harkat dan martabat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada, banyak sekali pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik dan dimana ternyata masih dimiliki kekuatan untuk menggerakkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada dalam masyarakat untuk mendukung pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan suatu hal yang harus diperjuangkan ditengah kondisi masih adanya ketimpangan gender di berbagai bidang pembangunan. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat terlihat dalam bentuk peningkatan kapasitas individu, kelompok, dan komunitas dalam mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Secara umum, pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Menyongsong periode lima tahun ke depan (2025-2029) diyakini dapat mengajak dan menggerakkan seluruh jajaran pelaku pembangunan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Probolinggo termasuk pemangku kepentingannya. Melalui rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo tahun 2025-2029, diharapkan dapat mempertegas posisi dan peran sektor kesejahteraan sosial dalam konstelasi pembangunan terutama di Kota Probolinggo yang merupakan bagian dari pembangunan kesejahteraan sosial secara nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan, sektor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk keadilan dan kesetaraan gender serta menanggulangi kekerasan pada anak serta sektor pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat secara

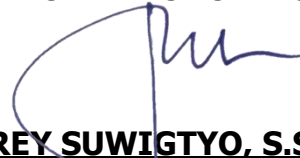
berkelanjutan. Dengan rencana yang lebih terukur dapat membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dengan lebih baik dan berorientasi kepada hasil.

Rencana strategis ini disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2029, serta diserasikan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional bidang kesejahteraan sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan anak serta bidang pemberdayaan masyarakat. Pengalaman pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, keadilan dan kesetaraan gender dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat sampai saat ini, kecenderungan perkembangan masyarakat, dan berbagai dampak dari krisis ekonomi global yang menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks.

Dengan demikian Renstra ini diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah sekaligus landasan bagi kebijakan dan program pembangunan di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. Walaupun rencana strategis ini telah disusun dengan maksimal dengan merujuk pada pedoman penyusunan rencana strategis, tetapi kami yakin masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan keterbukaan kami mengharapkan koreksi, masukan dan saran untuk penyempurnaan terutama dalam implementasi ketika pelaksanaan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo 2025-2029.

Probolinggo, September 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO**



Dr. REY SUWIGTYO, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670711 198809 1 001